

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP SISTEM ZONASI DI
KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN BANTAENG**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

Muhammad Aras Alfarizi

105381101319

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Muhammad Aras Alfarizi, 105381101319** diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 338 Tahun 1445 H/2023 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar **Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Ujian dan Yudisium pada hari Sabtu, 26 Agustus 2023.

07 Shafar 1445 H
Makassar, _____
23 Agustus 2023 M

PANITIA UJIAN

- Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag (.....)
- Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D (.....)
- Sekretaris : Dr. Baharullah, M.Pd (.....)
- Penguji
- 1 Dr. Jamaluddin Arifin, M.Pd (.....)
 - 2 Dr. Yumriani, M.Pd (.....)
 - 3 Hadisaputra, S.Pd., M.Si (.....)
 - 4 Syarifuddin, S.Pd., M.Pd (.....)

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi


Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 060934


Dr. Jamaluddin Arifin, M.Pd.
NBM: 117 4893

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Zonasi di MTS. Muhammadiyah
Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng
Nama : **Muhammad Aras Alfarizi**
NIM : **105381101319**
Prodi : Pendidikan Sosiologi
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang, skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

07 Shafar 1445 H

Makassar

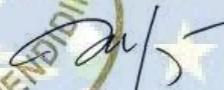
23 Agustus 2023 M

Disahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Kharuddin, S.Pd., M.Pd., Ph.D


Nur Riswandy Marsuki, S.Sos., M.Si

Mengetahui:

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi


Erwin Akib, S.Pd., M. Pd., Ph. D.
NBM: 860 934


Dr. Jamaluddin Arifin, M.Pd
NBM: 117 4893



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Aras Alfarizi
NIM : 105381101319
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Judul : Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Zonasi Di
Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Unismuh Makassar atau perguruan tinggi lainnya.

Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Unismuh Makassar.

Demikian pernyataan ini saya buat.

Makassar, 08 Agustus 2023
Yang membuat pernyataan,

Muhammad Aras Alfarizi



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar Fax. (0411) 860 132 Makassar 90211 www.fkip-unismuh-info

SURAT PERJANJIAN

Mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : Muhammad Aras Alfarizi
Stambuk : 105381101319
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal hingga selesai skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pemimpin fakultas
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 8 September 2023

Yang Membuat Perjanjian

Muhammad Aras Alfarizi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Perahu kayu ini sepertinya tidak layak dan akan tenggelam jika membawa orang lain selain diriku sendiri sekarang. Jika perahu ini sudah baik dan layak aku akan membawa orang lain bersamaku.

(Muhammad Aras Alfarizi)

Kaulah yang memutuskan jalan masa depanmu sendiri, tidak ada ada orang yang harus disalahkan jika kau terpuruk di jalan itu. Itu tanggung jawabmu sendiri, karena tidak ada seorangpun yang setertarik itu dengan air matamu. Maka dari itu jangan menggantungkan kebahagiaanmu pada orang lain.

(One Piece)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Karya ini untuk Ibu dan Bapak yang telah mendidik dan memberikan dukungan yang sangat besar. Untuk keluarga besar, saya mengucapkan banyak terima kasih atas suportnya hingga saya tetap semangat dalam belajar. Dan untuk teman-teman yang telah memberikan banyak masukan dan saran terima kasih karena sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat dan rahmat-nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Zonasi di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng”**.

Sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan contoh dan suri teladan yang baik bagi kehidupan manusia di seluruh dunia. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Sarjana Strata satu (S1). Di Prodi pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari dalam penyusunan Skripsi ini tidak akan selesai tanpa Bantuan dari berbagai pihak, karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Erwin Akib S.Pd, Ph.D Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Dr. Jamaluddin Arifin, M.Pd. selaku Ketua Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Kaharuddin, S.Pd., M.Pd. Ph.D Sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dengan sabar dan teliti dalam menyelesaikan Skripsi ini. Bapak Nur Riswandy Marsuki S.Sos., M.Si sebagai Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan arahan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan. Kepada kedua Orang Tua yang selalu memberikan Do'a dan Motivasi Serta dukungan bagi penulis sehingga dapat menyusun dan

menyelesaikan Skripsi ini. Kepada Teman-Teman Dekat dan Rekan-Rekan Mahasiswa dan semua pihak yang telah memberikan dorongan Do'a Motivasi sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi ini.

Makassar, 08 Agustus 2023

Penulis



Muhammad Aras Alfarizi

105381101319



ABSTRAK

Pendidikan memiliki peranan esensial dalam masyarakat modern, khususnya dalam era globalisasi di mana persaingan dalam mendapatkan pendidikan berkualitas semakin meningkat. Kebutuhan akan pendidikan yang penting dan strategis ini didukung oleh berbagai regulasi dan pemahaman masyarakat. Pendidikan tidak hanya mencakup pengembangan profesionalisme, tetapi juga membangun nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan.

Penelitian ini berfokus pada persepsi masyarakat terhadap sistem zonasi di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. Metode kualitatif studi kasus digunakan untuk memahami persepsi masyarakat terhadap sistem ini. Dalam konteks ini, sistem zonasi merupakan pengelompokan wilayah berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah sebagai kriteria utama. Pemahaman masyarakat tentang sistem zonasi bervariasi, termasuk dukungan dan kritik. Penelitian ini menerapkan teori-teori seperti interaksionisme simbolik dan teori fungsional Ogburn untuk menggambarkan pentingnya kesetaraan akses pendidikan tanpa memihak kelompok tertentu serta adaptasi masyarakat terhadap perubahan dalam sistem pendidikan.

Penelitian menyoroti bahwa keberhasilan sistem zonasi tergantung pada kualitas guru, fasilitas sekolah, serta partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah. Para orang tua berharap sistem ini memungkinkan akses pendidikan yang lebih merata dan dekat dengan rumah. Namun, beberapa masyarakat juga merasa skeptis terhadap perubahan ini, terutama karena khawatir tentang kualitas pendidikan di daerah tertentu.

Solusi dalam merespon kebijakan sistem zonasi melibatkan upaya kolaboratif dari masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait. Dibutuhkan peningkatan kualitas guru, sarana prasarana sekolah, serta penerapan program pelatihan dan pengembangan. Penting juga untuk menjaga transparansi dan keterlibatan semua pihak dalam pengambilan keputusan terkait perbaikan dan perkembangan sistem ini.

Dengan komitmen bersama dan kolaborasi yang efektif, diharapkan sistem zonasi pendidikan dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan membantu menciptakan pendidikan berkualitas bagi semua anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang atau lokasi geografis mereka.

Kata Kunci : sistem zonasi, persepsi, masyarakat

ABSTRACT

Education plays an essential role in modern society, especially in the era of globalization where the competition to obtain quality education is increasing. The need for this important and strategic education is supported by various regulations and societal understanding. Education not only encompasses the development of professionalism but also the cultivation of human and societal values.

This research focuses on the community's perception of the zoning system at Tompobulu sub-district. A qualitative case study method is employed to understand the community's perception of this system. In this context, the zoning system involves the categorization of areas based on the distance from residential areas to the school as the main criteria. The community's understanding of the zoning system varies, including both support and criticism. This research applies theories such as symbolic interactionism and Ogburn's functional theory to depict the importance of equal access to education without favoring specific groups, as well as the society's adaptation to changes in the education system.

The study highlights that the success of the zoning system depends on the quality of teachers, school facilities, as well as active participation from the community and the government. Parents hope that this system enables more equitable access to education and proximity to their homes. However, some members of the community also feel skeptical about this change, primarily due to concerns about the quality of education in specific areas.

The solution to respond to the zoning system policy involves collaborative efforts from the community, government, and relevant stakeholders. There is a need for an improvement in the quality of teachers, school infrastructure, as well as the implementation of training and development programs. It is also important to maintain transparency and involve all parties in decision-making related to the improvement and development of this system.

With shared commitment and effective collaboration, it is expected that the education zoning system can provide greater benefits and help create quality education for all children of Indonesia, regardless of their backgrounds or geographical locations.

Keywords: zoning system, perception, community

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Defenisi Operasional.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Kajian Konsep.....	13
B. Kajian Teori.....	29
C. Kerangka Berpikir	32
D. Hasil Penelitian Terdahulu	33
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39

C. Fokus Penelitian.....	40
D. Informan Penelitian	41
E. Jenis dan Sumber Data	42
F. Instrumen Penelitian.....	43
G. Teknik Pengumpulan Data	43
H. Teknik Analisis Data.....	46
I. Teknik Keabsahan Data.....	47
J. Etika Penelitian	48
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	49
A. Sejarah Lokasi Penelitian.....	49
B. Letak Geografi.....	49
C. Keadaan Sosial	50
D. Keadaan Pendidikan	51
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Hasil Penelitian.....	53
B. Pembahasan.....	62
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan Hasil Penelitian	70
B. Saran Penelitian	71
DAFTAR PUSTAKA	73

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu	34
3.1 Rancangan Kriteria Lokasi Penelitian.....	39
3.2 Waktu Penelitian	40
4.2 Jumlah Penduduk	52



DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Berpikir	33
-----------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi
2. Lampiran Plagiasi
3. Lampuran Persuratan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang esensial bagi manusia, terutama pada zaman sekarang di mana persaingan untuk memperoleh pendidikan yang semakin tinggi semakin meningkat. Di era globalisasi seperti sekarang, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Oleh karena itu, banyak orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya (Aleng & Sulistyarini, n.d.).

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam usaha meningkatkan kecerdasan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membangun dan meningkatkan martabat bangsa. Oleh karena itu, pemerintah berupaya secara serius untuk menangani berbagai masalah yang terkait dengan peningkatan pendidikan, mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga tingkat tinggi (Florida et al., 2012).

Pengertian pendidikan yang di tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 bahwa pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam pengertian yang sederhana dan umum makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun

rohani sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat (Florida et al., 2012).

Christoper J. Lucas, yang menyatakan bahwa pendidikan menyimpan kekuatan yang luar biasa untuk menciptakan keseluruhan aspek lingkungan hidup dan dapat memberi informasi yang paling berharga mengenai pasangan hidup masa depan di dunia serta membantu anak didik dalam mempersiapkan kebutuhan yang esensial untuk menghadapi perubahan (Nugraha, 2019).

Sebuah efek langsung dari pendidikan adalah dengan adanya mendapatkan pengetahuan yang luas. Pendidikan memberikan pelajaran yang begitu penting bagi manusia mengenai dunia sekitar, mengembangkan perspektif dalam memandang kehidupan. Pendidikan yang sebenarnya diperoleh dari pelajaran yang diajarkan oleh kehidupan. Pendidikan dapat menghapus keyakinan yang salah di dalam pikiran. Selain itu juga dapat membantu dalam menciptakan suatu gambaran yang jelas mengenai hal di sekitar, juga dapat menghapus semua kebingungan. Orang dengan pendidikan yang tinggi biasanya akan lebih bijak dalam menyelesaikan suatu masalah, hal ini dikarenakan mereka sudah mempelajari mengenai ilmu pendidikan dalam kehidupan (Florida et al., 2012).

Pendidikan merupakan aspek yang tak terpisahkan dari kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Masyarakat adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada kelompok individu yang berasal dari Bahasa Arab, yakni Syaraka, yang memiliki arti ikut serta, berpartisipasi. Istilah ini kemudian mengalami perubahan dalam bahasa Indonesia menjadi

masyarakat (Juabdin Sada & Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

Masyarakat merupakan kumpulan individu dengan beragam tingkat pendidikan, mulai dari yang tidak berpendidikan hingga yang memiliki pendidikan tinggi. Kualitas suatu masyarakat ditentukan oleh pendidikan yang diterima oleh anggotanya. Semakin baik pendidikan yang diterima oleh anggota masyarakat, maka kualitas masyarakat secara keseluruhan akan semakin baik pula.

Partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan pendidikan anak. Oleh karena itu, masyarakat seharusnya terlibat dan ikut serta dalam kegiatan pendidikan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan antara lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam konteks pendidikan.

Peran orang tua relevan dengan penelitian Valeza (2017) mengenai peran orang tua dalam perkembangan prestasi anak antara lain: orang tua memberikan semangat anak bahwa pendidikan itu penting untuk masa depan, memotivasi anak agar selalu meningkatkan prestasi belajar mereka, tempat untuk menanyakan dan mengadu terkait masalah anak. Peran orang tua sangat diperlukan agar bangsa Indonesia menjadi maju. Orang tua dapat memenuhi pendidikan anak sampai ke jenjang Perguruan Tinggi merupakan salah satu cara agar menciptakan generasi yang berkualitas (Maldini, 2019).

Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan tempat di mana anak-anak mereka menempuh pendidikan. Dalam mendukung pendidikan anak-anak, orang tua memainkan peran yang sangat penting. Salah satu langkah awal adalah memilih institusi pendidikan yang

sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak. Keputusan ini harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti prestasi akademis, lingkungan belajar, fasilitas yang tersedia, biaya, dan kualifikasi pengajar. Selanjutnya, orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan aktif dalam proses pendidikan anak-anak. Ini mencakup membantu mereka dengan tugas-tugas rumah, berpartisipasi dalam pertemuan dengan guru, dan mendukung kegiatan sekolah.

Selain itu, menjaga komunikasi yang efektif antara orang tua dan lembaga pendidikan sangat penting. Ini dapat dicapai melalui partisipasi dalam pertemuan orang tua-guru dan dengan memantau perkembangan pendidikan anak di sekolah. Dalam hal ini, orang tua perlu terlibat dan berkolaborasi dengan guru untuk memastikan perkembangan yang baik bagi anak-anak.

Mendorong anak-anak untuk bertanggung jawab atas pendidikan mereka juga merupakan aspek penting dalam peran orang tua. Dorongan ini membantu anak-anak mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab dalam belajar. Orang tua juga perlu menyediakan sumber daya yang diperlukan, seperti buku-buku dan materi pendukung lainnya, untuk mendukung proses pembelajaran anak-anak di rumah.

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan nilai-nilai dan etika kepada anak-anak. Ini mencakup nilai-nilai seperti kerja keras, disiplin, dan integritas. Dengan mengajarkan prinsip-prinsip ini, orang tua membantu membentuk karakter anak-anak dan persiapan mereka untuk masa depan. Dengan menjalankan semua peran ini secara efektif, orang tua

dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk pendidikan dan perkembangan anak-anak secara holistik.

Peran-peran orang tua itu membantu anak-anak mereka dalam memilih tempat pendidikan yang tepat dan mendukung mereka dalam mencapai kesuksesan dalam pendidikan mereka. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai strategi seperti menerbitkan peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018. Peraturan ini berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru di tingkat dasar hingga menengah atas untuk sekolah-sekolah di bawah kendali pemerintah daerah. Salah satu strateginya adalah dengan menerapkan sistem zonasi. Sistem zonasi diterapkan untuk mencapai tujuan pemerataan pendidikan dan menghilangkan stratifikasi dalam dunia Pendidikan (Anam, 2019).

Kebijakan zonasi sebagai bagian dari manajemen peserta didik telah diterapkan sejak tahun ajaran 2017/2018 berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 yang berlaku untuk penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan sejenisnya. Kebijakan tersebut telah mengalami perubahan seiring waktu, di mana pada tahun 2018, zonasi diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dan untuk tahun ajaran 2019/2020, kebijakan ini tertuang dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 yang kemudian diperbaharui menjadi Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019. Tujuan dari kebijakan zonasi baru adalah untuk meningkatkan akses layanan pendidikan, sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan

SMK. (Ika & Rukiyati, 2019).

Sistem zonasi adalah bentuk peningkatan efisiensi bagi masyarakat dalam memasukkan anaknya ke sekolah yang dekat dengan rumahnya, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (3) dari bagian keempat Permendikbud. Ayat ini menegaskan bahwa radius zona terdekat harus ditentukan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan kapasitas rombongan belajar pada masing-masing sekolah. Selain itu, ayat (4) menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala sekolah dalam menetapkan radius zona sebagaimana yang dijelaskan pada ayat (3).

Sistem zonasi bertujuan untuk menciptakan kesetaraan mutu pendidikan di semua sekolah di Indonesia dengan menghapus perbedaan antara sekolah favorit dan tidak favorit (Dauta, 2020). Sistem zonasi memungkinkan sekolah di daerah terpencil atau miskin untuk mendapatkan siswa baru yang tinggal di wilayah mereka, sehingga meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah tersebut. Selain itu, sistem zonasi juga diharapkan dapat mengurangi persaingan yang ketat di antara orang tua siswa untuk memasukkan anak mereka ke sekolah-sekolah terbaik di kota. Dengan sistem zonasi, orang tua tidak perlu khawatir tentang biaya transportasi atau kesulitan dalam mencari tempat tinggal dekat sekolah terbaik karena mereka dapat mencari sekolah terbaik di zona tempat tinggal mereka.

Kebijakan ini tentunya menuai tanggapan pro dan kontra dalam masyarakat bahkan memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah

bahwa sistem ini dapat membatasi pilihan orang tua dalam memilih sekolah untuk anak-anak mereka. Terkadang, orang tua menginginkan anak-anak mereka untuk masuk ke sekolah tertentu di luar zona tempat tinggal mereka, karena alasan tertentu seperti kualitas pendidikan, kurikulum yang ditawarkan, atau budaya dan lingkungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan anak-anak mereka.

Kabupaten Bantaeng memiliki 8 wilayah kecamatan yang dibagi menjadi 46 desa dan 21 kelurahan. Kecamatan-kecamatan tersebut meliputi Bissappu dengan 4 desa dan 7 kelurahan, Uluere dengan 6 desa, Sinoa dengan 6 desa, Bantaeng dengan 1 desa dan 8 kelurahan, Eremerasa dengan 9 desa, Tompobulu dengan 6 desa dan 4 kelurahan, Pajjukukang dengan 10 desa, serta Gantarangkeke dengan 4 desa dan 2 kelurahan.

Kecamatan Tompobulu merupakan salah satu dari 8 Kecamatan yang beradadi Kabupaten Bantaeng dengan luas wilayah 76.99 km². Dari segi administratif, Kecamatan Tompobulu mencakup area seluas 76,99 kilometer persegi dengan 10 Desa atau Kelurahan yang termasuk di dalamnya. Ini mencakup Kelurahan Banyorang, Lembang Gantarangkeke, Pattallassang, Campaga, Labbo, Ereng-ereng, Bonto Tappalang, Pattaneteang, Bonto-bontoadan, serta Balumbung. Maka dari itu dalam hal sistem zonasi, sesuai arahan dan kebijakan dari Kemendikbud dan pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten Bantaeng melebarkan sistem zonasi di kecamatan Tompobulu menjadi satu kecamatan. Artinya desa atau kelurahan di kecamatan Tompobulu bisa keluar pada daerah mereka untuk sekolah, selama masih dalam lingkup kecamatan Tompobulu.

Dikutip dari kemdikbud.go.id, peran pemerintah pusat dalam mengelola PPDB melalui jalur zonasi tidak dapat disamakan secara merata. pemerintah pusat bertindak sebagai fasilitator, tidak berfungsi sebagai regulator yang mengabaikan situasi dan kebutuhan di berbagai daerah. Fungsinya adalah memfasilitasi upaya pemerintah daerah dalam mengelola sistem pendidikan, agar setiap anak di wilayah tersebut memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan berkualitas, dan agar sistem ini lebih mengedepankan keadilan sosial. Ketika mengevaluasi implementasi PPDB di berbagai daerah, terdapat kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengidentifikasi jumlah anak sekolah dan kapasitas sekolah saat mengadakan PPDB. Karena hal tersebut, penerapan PPDB melalui jalur zonasi dengan persentase yang besar menjadi suatu tantangan. Oleh sebab itu, pemerintah pusat telah mengeluarkan peraturan yang lebih fleksibel dalam hal ini. Sementara itu, pemerintah pusat juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan data yang akurat terkait jumlah anak usia sekolah yang berpartisipasi dalam PPDB, meningkatkan kapasitas sekolah agar dapat menampung jumlah siswa yang memadai, dan meningkatkan mutu pendidikan di setiap sekolah guna memastikan bahwa kualitas pendidikan yang unggul dapat dinikmati oleh semua anak di Indonesia.

Meskipun sistem zonasi memiliki kekurangan, penerapannya masih dianggap sebagai langkah positif dalam meningkatkan akses pendidikan dan mengurangi kesenjangan pendidikan. Dengan demikian, pemerintah perlu terus memperbaiki dan memperkuat sistem zonasi agar lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi kesenjangan antara

sekolah favorit dan tidak favorit terutama dalam pembahasan ini yaitu di kecamatan Tompobulu kabupaten Bantaeng.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan mengangkat judul,

**“PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP SISTEM ZONASI DI
KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN BANTAENG”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kebijakan sistem zonasi di kecamatan Tompobulu?
2. Bagaimana dampak dan solusi yang diambil dalam merespon kebijakan sistem zonasi di kecamatan Tompobulu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang diajukan di atas, yaitu:

1. Menganalisis bagaimana terhadap kebijakan sistem zonasi di kecamatan Tompobulu
2. Merancang solusi yang diambil dalam merespon dampak kebijakan sistem zonasi di kecamatan Tompobulu

D. Manfaat Penelitian

Penelitian itu diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai sumbangsih pemikiran untuk mengembangkan khazanah keilmuan dalam dunia Pendidikan.

b. Menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti – peneliti selanjutnya dalam upaya mengembangkan penelitian dalam bidang sejenis.

3. Manfaat praktis

a. Bagi institusi, hasil penelitian ini dijadikan sebagai dokumentasi dan sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya, seklaigus sebagai kajian bagi mahasiswa.

b. Bagi pemerintah, untuk memberikan input dan tambahan informasi tentang respon orang tua mengenai system zonasi.

c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini bisa memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas khususnya bagi mahasiswa.

d. Bagi peneliti, sebagai sumber informasi dan referensi dalam pengembangan penelitian yang berkaitan dengan system zonasi.

E. Defenisi Operasional

Persepsi adalah proses di mana individu memilih, mengatur, dan memberikan arti pada rangsangan atau informasi yang diterima melalui panca inderanya. Dalam hal ini, persepsi melibatkan cara seseorang memahami dan menginterpretasikan dunia di sekitarnya berdasarkan pengalaman, pengetahuan, keyakinan, dan nilai-nilai yang dimilikinya. Persepsi juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perhatian, motivasi, emosi, dan konteks sosial. Oleh karena itu, persepsi individu terhadap suatu objek, situasi, atau orang dapat berbeda-beda dari persepsi

orang lain yang memiliki pengalaman, pengetahuan, keyakinan, dan nilai-nilai yang berbeda.

Masyarakat adalah sebuah entitas yang terdiri dari individu-individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah atau lingkungan tertentu. Masyarakat adalah kelompok manusia yang saling berinteraksi, memiliki struktur sosial, nilai-nilai, norma-norma, dan sistem kepercayaan yang memengaruhi pola hidup dan interaksi antaranggota masyarakat. Masyarakat juga mencakup lembaga-lembaga sosial, seperti keluarga, sekolah, pemerintahan, dan organisasi-organisasi lainnya, yang berperan dalam mengatur dan mempengaruhi kehidupan bersama dalam masyarakat.

Sistem zonasi adalah sebuah sistem yang digunakan dalam pendidikan untuk membagi suatu wilayah menjadi beberapa zona atau daerah tertentu, dengan tujuan untuk mengatur dan membatasi akses siswa ke sekolah-sekolah di wilayah tersebut. Sistem zonasi sering diterapkan untuk mengatasi masalah kesenjangan akses pendidikan, di mana sekolah-sekolah yang berkualitas biasanya terkonsentrasi di daerah-daerah perkotaan atau kawasan yang lebih makmur, sementara daerah-daerah yang kurang berkembang atau pedesaan terbatas dalam pilihan sekolah yang berkualitas.

Sekolah adalah sebuah lembaga pendidikan yang menyediakan program pendidikan formal untuk siswa dari berbagai usia, mulai dari anak usia dini hingga dewasa. Sekolah umumnya bertujuan untuk membantu siswa dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang

dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendidikan mereka, seperti lulus ujian, memperoleh sertifikat atau gelar, atau persiapan untuk kehidupan kerja.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Konsep

1. Pengembangan Pendidikan

Investasi dalam pendidikan berkualitas sangat penting untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Pendidikan memiliki peran vital dalam menciptakan masyarakat yang lebih maju dan kompetitif, dengan tujuan menciptakan individu yang dapat mewujudkan potensi penuh mereka dan berkontribusi pada berbagai aspek kehidupan. Sejak Juni 2015, Indonesia telah meluncurkan program pendidikan wajib selama 12 tahun yang dimulai dari enam tahun sekolah dasar, tiga tahun sekolah menengah pertama, dan tiga tahun sekolah menengah atas. Program pendidikan wajib selama 12 tahun bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam Nawa Cita kelima, yaitu meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat Indonesia dengan program Indonesia Pintar. Namun, tantangan utama dalam pengembangan pendidikan adalah meningkatkan kualitas dan kesetaraan pendidikan. (Yuniar, 2021).

Terdapat tiga jenis jalur pendidikan, yakni pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal dapat diperoleh melalui lembaga pendidikan seperti sekolah dan memiliki struktur yang terdiri dari tingkatan pendidikan mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi. Terdapat tiga jenjang dalam pendidikan formal, yaitu pendidikan dasar (SD, SMP), pendidikan menengah (SMA, SMK), dan pendidikan tinggi (Diploma, Sarjana).

Pendidikan dasar berdurasi sembilan tahun, dengan enam tahun dilakukan di Sekolah Dasar dan tiga tahun di Sekolah Menengah Pertama. Fokus pendidikan dasar adalah memberikan landasan kemampuan dasar kepada peserta didik untuk meningkatkan diri sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan manusia seutuhnya. Tujuan utamanya adalah mempersiapkan peserta didik agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah.

Pendidikan menengah berlangsung selama tiga tahun dan memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk melanjutkan serta memperluas pendidikan dasar yang telah diperoleh oleh peserta didik. Kedua, untuk mempersiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang mampu berinteraksi dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar serta memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri lebih lanjut, baik dalam dunia kerja maupun pendidikan selanjutnya di jenjang pendidikan tinggi.

Tahapan pendidikan berikutnya setelah pendidikan menengah adalah pendidikan tinggi, yang mencakup berbagai bentuk penyelenggaraan. Pendidikan tinggi bertujuan untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan akademik dan profesional untuk menerapkan, mengembangkan, serta menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi.

a. Pengertian Pendidikan Dalam Arti Luas

Kata "pendidikan" dalam Bahasa Inggris diterjemahkan sebagai "*education*", yang berasal dari kata Bahasa Latin "*Eductum*". Kata "*Eductum*" terdiri dari dua kata, yakni "E" yang berarti perkembangan dari dalam ke luar atau dari sedikit ke banyak, dan "*Duco*" yang berarti sedang berkembang.

Oleh karena itu, secara etimologis, pendidikan adalah suatu proses pengembangan yang terjadi dalam diri individu.

Secara umum, pendidikan dianggap sebagai proses yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan seseorang. Dalam kata lain, pendidikan dapat mencakup segala jenis aktivitas yang berkontribusi pada pengembangan individu di berbagai lingkungan, dan berlangsung sepanjang hidup individu tersebut. Pendekatan ini melibatkan dimensi-dimensi lain seperti interaksi manusia dengan aspek lain seperti manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan budayanya, dan bahkan manusia dengan Tuhannya. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan interaksi individu dengan lingkungan dalam proses pendidikan (Uyun, 2019).

Terkait dengan hubungan multidimensi yang dijelaskan di atas, pendidikan biasanya terjadi melalui berbagai aktivitas, kegiatan, dan praktik yang beragam, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Pandangan ini sesuai dengan pernyataan dari Rupert S. Lodge yang mengatakan: "Secara umum, semua pengalaman dikatakan bersifat mendidik.... Segala sesuatu yang kita katakan, pikirkan, atau lakukan, mendidik kita, tidak kurang dari apa yang dikatakan atau dilakukan kepada kita oleh makhluk hidup atau benda mati lainnya. Dalam arti yang lebih luas, kehidupan adalah pendidikan, dan pendidikan adalah kehidupan".

Arti yang luas dari pendidikan dapat diartikan bahwa kegiatan pendidikan bisa terjadi di berbagai tempat dan waktu, baik itu di lingkungan pendidikan formal seperti sekolah dan universitas, di lingkungan keluarga, atau bahkan di lingkungan masyarakat.

Pendidikan, baik yang disadari maupun tidak, selalu memiliki arah atau tujuan tertentu. Tujuan pendidikan secara umum terdapat dalam setiap pengalaman belajar, dan bukan ditentukan oleh pihak luar individu. Pertumbuhan merupakan salah satu tujuan pendidikan secara umum dan jumlah tujuan pendidikan tidak terbatas.

b. Pengertian Pendidikan Dalam Arti Sempit

Rupert S. Lodge menyatakan bahwa dalam arti yang lebih sempit, pendidikan sama dengan penyekolahan atau pembelajaran formal di bawah kondisi yang terkontrol. Dalam hal ini, pendidikan hanya merujuk pada aktivitas formal yang terjadi di lingkungan sekolah atau universitas dengan ciri-ciri tertentu. Sebaliknya, dalam arti yang lebih luas, pendidikan mencakup semua bentuk pengalaman belajar tanpa dibatasi oleh lingkungan atau kondisi tertentu (Uyun, 2019).

Dalam arti sempit, pendidikan hanya diberikan kepada individu yang tercatat sebagai siswa atau mahasiswa di suatu institusi pendidikan formal. Arti sempit ini juga membatasi lingkup pendidikan pada lembaga pendidikan formal seperti sekolah atau universitas. Proses pendidikan dilakukan melalui kegiatan pembelajaran (*studying*) dan pengajaran (*instruction*) yang terstruktur dan bersifat formal, serta dibatasi oleh kurikulum, pelajaran, dan materi yang akan diberikan. Semua aktivitas pendidikan diatur dengan sengaja menggunakan berbagai sarana dan sistem yang terkontrol.

Dalam arti sempit, pendidikan juga memiliki batasan waktu. Durasi pendidikan seseorang dapat bervariasi tergantung pada kemampuan pribadi, faktor ekonomi, dan berbagai faktor lainnya. Oleh karena itu, pendidikan

dapat diukur dan ditentukan dalam jangka waktu yang spesifik.

c. Pengertian Pendidikan dalam Pendekatan Ilmiah

Pendekatan ilmiah dalam pendidikan merujuk pada pandangan bahwa pendidikan dipandang dari sudut pandang satu disiplin ilmu tertentu, seperti psikologi, sosiologi, politik, ekonomi, antropologi, dan lain-lain. Misalnya, pendekatan psikologi pendidikan memandang pendidikan sebagai proses pengembangan individu, sementara sosiologi melihat pendidikan sebagai proses persiapan individu untuk menjadi anggota masyarakat yang diharapkan. Pandangan politik memandang pendidikan sebagai proses persiapan warga negara yang baik, sementara ekonomi memandang pendidikan sebagai investasi dalam bentuk modal manusia.

Menurut pendekatan sosiologi, pendidikan dianggap sebagai sosialisasi, yaitu suatu proses yang membantu generasi muda untuk dapat menjadi anggota masyarakat yang diinginkan. Emile Durkheim memberikan definisi bahwa "pendidikan adalah pengaruh yang dilakukan oleh generasi dewasa pada mereka yang belum siap untuk kehidupan sosial. Tujuannya adalah untuk membangkitkan dan mengembangkan sejumlah kondisi fisik, intelektual, dan moral pada anak sesuai dengan tuntutan masyarakat politik secara keseluruhan dan dengan lingkungan khusus tempat anak tersebut akan hidup dan berada".

Menurut pendekatan antropologi, pendidikan dianggap sama dengan enkulturasi atau pembudayaan. Artinya, pendidikan adalah proses di mana seseorang menyesuaikan diri dengan budaya masyarakat dan menyerap nilai-nilai yang ada di dalamnya.

Dalam perspektif ekonomi, pendidikan dianggap sebagai investasi manusia atau upaya untuk mengembangkan modal manusia agar kualitas tenaga kerja meningkat sehingga dapat meningkatkan produksi barang dan/atau jasa.

Dalam perspektif biologi, pendidikan diartikan sebagai proses adaptasi, seperti yang didefinisikan oleh Horne, yaitu pendidikan adalah proses penyesuaian terbaik individu yang sadar dengan lingkungannya.

Berdasarkan pendekatan psikologi, pendidikan dianggap sebagai personalisasi yang bertujuan untuk membantu individu mengubah perilaku mereka sehingga dapat mencapai potensi pribadi terbaik dan tumbuh menjadi diri mereka yang sebenarnya.

Langeveld menyatakan bahwa pendidikan melibatkan tindakan yang disengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Ada beberapa unsur yang saling terkait dalam pendidikan, yaitu tujuan pendidikan, kurikulum, peserta didik, pendidik, interaksi edukatif, isi pendidikan, dan lingkungan pendidikan.

d. Pengertian Pendidikan dalam Pendekatan Sistem

Dalam pendekatan sistem, pendidikan adalah suatu keseluruhan karya manusia yang terbentuk atas komponen-komponen yang saling berhubungan secara fungsional dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.

Dalam pendekatan sistem, pendidikan yang terdiri dari sejumlah komponen yang saling berkorelasi secara fungsional dalam mencapai tujuan pendidikan sebagaimana Menurut P.H. Coombs , terdiri dari tiga jenis sumber input dari masyarakat bagi sistem pendidikan, yaitu :

- 1) Ilmu pengetahuan, nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang berlaku di dalam masyarakat;
- 2) Penduduk serta tenaga kerja yang berkualitas;
- 3) Ekonomi atau penghasilan masyarakat.

Adapun komponen-komponen sistem pendidikan meliputi :

Sistem pendidikan memiliki berbagai komponen yang sangat penting dalam mengarahkan semua kegiatan pendidikan. Salah satunya adalah tujuan dan prioritas, yang berfungsi sebagai pedoman untuk mencapai hasil pendidikan yang diinginkan. Siswa atau peserta didik, memiliki peran utama dalam menjalani proses pendidikan, di mana mereka belajar dan mengembangkan diri. Pengelolaan atau manajemen pendidikan, memiliki peran dalam mengkoordinasikan, mengarahkan, dan menilai seluruh sistem pendidikan.

Struktur dan jadwal berfungsi untuk mengatur waktu dan pengelompokan siswa sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan tertentu. Isi atau kurikulum, yang menjadi materi yang harus dipelajari oleh siswa selama proses pendidikan. Guru atau pendidik, membantu menyediakan materi dan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar untuk siswa.

Alat bantu belajar, bertujuan untuk membuat proses KBM menjadi lebih menarik, bervariasi, dan mudah dipahami oleh siswa. Fasilitas, penting dalam menyediakan tempat untuk terjadinya kegiatan belajar mengajar. Teknologi, memiliki peran dalam memperlancar proses KBM.

Kualitas, yang berfungsi dalam membina sistem peraturan dan kriteria pendidikan untuk menjaga mutu pendidikan. Penelitian, berperan dalam

mengembangkan pengetahuan, meningkatkan kinerja sistem, dan hasil kerja sistem pendidikan. Biaya, yang menjadi petunjuk untuk mengukur efisiensi sistem pendidikan. Semua komponen ini saling berhubungan dan berperan penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.

Interaksi fungsional antara komponen-komponen dalam sistem pendidikan bertujuan untuk mengubah input awal (siswa) menjadi hasil output pendidikan. Tujuan utama output pendidikan adalah untuk mencetak individu terdidik yang memiliki kecerdasan intelektual dan emosional, serta memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas, serta etika dan moral yang baik.

2. Masyarakat Pendidikan

a. Masyarakat dan Pendidikan

Masyarakat merujuk pada kelompok individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah atau lingkungan tertentu. Masyarakat terbentuk melalui interaksi antara individu-individu tersebut, yang membentuk hubungan sosial, norma-norma, nilai-nilai, dan sistem kepercayaan yang mengatur pola hidup mereka.

Masyarakat dari segi pendidikan dapat diartikan sebagai bagaimana suatu kelompok atau komunitas manusia berinteraksi, mengakses, dan menghargai pendidikan dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dan mengembangkan masyarakat, karena melalui pendidikan, nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan, dan norma-norma diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Masyarakat adalah suatu kesatuan yang rumit yang melibatkan berbagai komponen, seperti keluarga, sekolah, pemerintahan, agama, ekonomi, dan berbagai organisasi sosial lainnya. Setiap komponen tersebut memiliki peran yang signifikan dalam membentuk kerangka dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Masyarakat memiliki ciri khas yang istimewa dan beragam. Dalam masyarakat terdapat keberagaman budaya, bahasa, agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang membentuk identitas bersama. Sistem hukum dan peraturan juga hadir dalam masyarakat untuk mengatur perilaku dan interaksi antarindividu. Masyarakat juga mencerminkan adanya situasi yang sekaligus menunjukkan kesetaraan dan ketidaksetaraan. Perbedaan dalam hal status sosial, kekayaan, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta kekuasaan politik dapat ditemukan di dalam masyarakat. Walaupun demikian, masyarakat juga menunjukkan usaha untuk mencapai keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya.

Partisipasi masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk identitas individu, mengatur perilaku sosial, dan menentukan arah perkembangan suatu wilayah. Keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan merupakan faktor utama dalam membangun masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif.

b. Persepsi Masyarakat Terhadap Pendidikan

Persepsi masyarakat terhadap pendidikan memiliki dimensi yang beragam, tercermin dari budaya, nilai-nilai, dan lingkungan sosial yang melingkupinya. Beberapa masyarakat menganggap pendidikan sebagai

fondasi penting untuk kemajuan pribadi dan sosial, menghubungkannya dengan peluang ekonomi yang lebih baik dan pemahaman yang lebih luas tentang dunia. Di sisi lain, terdapat masyarakat yang mungkin lebih menekankan pada nilai-nilai tradisional atau pekerjaan fisik, dan melihat pendidikan sebagai sesuatu yang kurang relevan atau terlalu jauh dari realitas sehari-hari. Faktor-faktor seperti aksesibilitas pendidikan, hasil pendidikan yang diperoleh, serta peran teknologi dan media juga ikut membentuk pandangan masyarakat. Selain itu, kesenjangan sosial, pengalaman pribadi, dan perubahan tuntutan dunia kerja juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap pendidikan.

Persepsi masyarakat merujuk pada bagaimana anggota-anggota dalam suatu masyarakat memahami, menafsirkan, dan memberikan makna terhadap berbagai fenomena yang ada di sekitar mereka. Faktor-faktor seperti budaya, nilai-nilai, pengalaman, pendidikan, media, dan interaksi sosial dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap fenomena-fenomena tersebut.

Persepsi masyarakat melibatkan berbagai aspek, termasuk pandangan mereka tentang politik, ekonomi, agama, budaya, dan isu-isu sosial. Masyarakat memiliki persepsi yang beragam terhadap hal-hal ini, dan perbedaan persepsi tersebut dapat mempengaruhi pola pikir, sikap, dan tindakan individu-individu dalam masyarakat. Persepsi masyarakat juga berdampak pada cara individu-individu berinteraksi, membentuk kelompok sosial, dan mengembangkan norma-norma serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kesesuaian persepsi antara anggota masyarakat dapat memperkuat kesatuan, sedangkan perbedaan persepsi dapat menyebabkan

konflik atau perbedaan pandangan dalam masyarakat.

Penting untuk diakui bahwa persepsi masyarakat dapat berubah seiring waktu. Perubahan sosial, perkembangan teknologi, perubahan politik, atau peristiwa signifikan lainnya dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap berbagai hal. Dalam konteks demokrasi, persepsi masyarakat juga berperan dalam proses pengambilan keputusan politik dan pembentukan opini publik. Persepsi masyarakat menjadi faktor penting yang dipertimbangkan oleh pemimpin politik, pengambil kebijakan, dan media dalam upaya memahami aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

c. Peran Masyarakat Dalam Pendidikan

Pendidikan berperan sebagai penghubung antara masyarakat atau hubungan pendidikan dengan masyarakat. Penting untuk diakui bahwa masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam keberadaan, kelangsungan, dan kemajuan pendidikan. Setidaknya, masyarakat menjadi salah satu faktor penentu nasib pendidikan. Jika pendidikan berkembang dengan baik, dapat dipastikan bahwa keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang maksimal menjadi salah satu faktor keberhasilannya. Sebaliknya, jika pendidikan mengalami kemunduran, salah satu penyebabnya bisa jadi karena masyarakat enggan memberikan dukungan (Normina, n.d.).

Tuntutan pengembangan sumber daya pada manusia semakin meningkat, maka layanan pada pendidikan haruslah mampu mengikuti dan mengimbangi perkembangan tersebut. Selain keluarga dan Lembaga pendidikan, masyarakat sangat memiliki peran penting terhadap Pendidikan (Juabdin Sada & Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

3. Peran Pemerintah dalam Pendidikan

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, pemerintah bertanggung jawab sebagai penyelenggara negara dalam bidang pendidikan. Tugas pemerintah dan pemerintah daerah adalah untuk memberikan arahan, bimbingan, bantuan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan, serta memastikan pemberian layanan dan kemudahan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi bagi seluruh warga negara. Selain itu, pemerintah dan pemerintah daerah juga berkewajiban untuk menjamin tersedianya dana untuk pendidikan bagi seluruh warga negara mulai usia tujuh hingga lima belas tahun. Namun, masih terdapat peluang yang luas bagi orang tua/warga dan kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pendidikan (Nyoman & Astawa, n.d.).

Setiap manusia wajib memperoleh sumber ilmu dan pengetahuan melalui pendidikan, baik di dalam maupun di luar sekolah. Pemerintah telah mengeluarkan program untuk meningkatkan kesadaran dalam menimba ilmu di dunia pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Tujuan dari peningkatan mutu pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia. Hal ini penting agar setiap warga negara Indonesia memiliki akses terhadap pendidikan yang layak dan dapat mengembangkan kemampuan yang diperoleh melalui pendidikan, sehingga dapat bersaing dengan pekerja dari dalam maupun luar negeri dan memberikan kontribusi bagi pemerintah.

Untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas, pemerintah memiliki sejumlah peran dan tanggung jawab yang sangat penting. Pertama,

pemerintah harus memastikan akses pendidikan yang adil bagi seluruh warga negara, tanpa adanya diskriminasi dan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat yang beragam. Kedua, pemerintah perlu menetapkan kebijakan pendidikan yang terkait dengan kurikulum, standar akademik, dan kualitas pengajaran, sehingga memastikan bahwa pendidikan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pengalokasian anggaran yang memadai juga merupakan langkah kunci, di mana pemerintah harus mengalokasikan dana yang cukup untuk mendukung sistem pendidikan, termasuk untuk infrastruktur, peralatan pendidikan, dan pendidik yang berkualitas. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam mengembangkan tenaga pendidik yang kompeten melalui pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan.

Pemerintah memiliki peran dalam mendorong riset dan pengembangan pendidikan untuk menghasilkan pengetahuan baru dan memperbaiki sistem pendidikan yang ada. Mengatur dan mengawasi lembaga pendidikan juga menjadi tanggung jawab pemerintah guna memastikan bahwa standar kualitas pendidikan terpenuhi. Terakhir, pemerintah harus aktif dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan, baik melalui program-program bantuan maupun dukungan lainnya, sehingga pendidikan menjadi tanggung jawab bersama untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan dalam bidang pendidikan. Semua upaya ini bersama-sama membentuk dasar pendidikan yang kuat dan inklusif untuk masyarakat.

Pemerintah dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat fondasi pembangunan negara yang lebih baik dengan memainkan peran ini

dengan baik

4. Pengertian Sistem Zonasi

Menurut Wahyuni (2018), sistem zonasi merupakan suatu sistem yang mengharuskan siswa untuk belajar di sekolah yang letaknya terdekat dengan tempat tinggal mereka (Syakarofath et al., 2020). Sistem ini mengatur penempatan siswa ke sekolah terdekat dari tempat tinggal mereka, sehingga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan akses pendidikan dan mendorong keadilan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Namun, seperti halnya kebijakan baru lainnya, sistem zonasi tidak luput dari kelebihan dan tantangan yang perlu diperhatikan.

a. Kelebihan Sistem Zonasi

Pertama, sistem zonasi dapat mengurangi kesenjangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Siswa-siswa di pedesaan memiliki kesulitan untuk memperoleh akses pendidikan yang sama dengan siswa di perkotaan. Dengan sistem zonasi, siswa-siswa di pedesaan akan lebih mudah untuk menjangkau sekolah terdekat dari tempat tinggal mereka.

Kedua, sistem zonasi dapat mendorong keadilan dalam sistem pendidikan. Dalam sistem pendidikan sebelumnya, sekolah-sekolah yang terkenal dan berkualitas baik sering kali hanya menerima siswa-siswa dari keluarga yang mampu secara finansial dan tinggal di dekat sekolah. Dengan adanya sistem zonasi, setiap siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah terbaik tanpa melihat status sosial atau keuangannya.

Ketiga, sistem zonasi dapat meningkatkan rasa solidaritas antarwarga di lingkungan sekitar. Sistem ini dapat memperkuat hubungan antara siswa, orangtua, dan masyarakat sekitar, karena siswa akan belajar bersama-sama di sekolah terdekat dari tempat tinggal mereka.

b. Tantangan Sistem Zonasi

Namun, sistem zonasi juga memiliki tantangan yang perlu diperhatikan. Pertama, sistem zonasi dapat mengurangi fleksibilitas pilihan sekolah bagi siswa dan orangtua. Dalam sistem zonasi, siswa harus belajar di sekolah terdekat dari tempat tinggal mereka, meskipun sekolah tersebut tidak cocok dengan minat dan bakat siswa.

Kedua, sistem zonasi memerlukan pengaturan yang matang dan tepat dalam menentukan radius sekolah yang diakui sebagai zonasi. Salah penentuan radius dapat memperburuk ketimpangan akses pendidikan.

Ketiga, pelaksanaan sistem zonasi memerlukan kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat setempat. Hal ini memerlukan waktu dan upaya yang cukup besar untuk membangun kesepakatan dan pemahaman yang sama antara pihak-pihak yang terlibat.

c. Tujuan Sistem Zonasi

Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan aksesibilitas pendidikan, khususnya di wilayah yang masih terdapat kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi.

Salah satu tujuan dari sistem zonasi adalah untuk mewujudkan pendidikan yang merata bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Dengan menggunakan sistem zonasi, pemerintah ingin

mengurangi kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan. Siswa-siswa yang tinggal di daerah terpencil atau miskin dapat mengenyam pendidikan yang sama dengan siswa-siswa di daerah yang lebih maju.

Selain itu, sistem zonasi juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan di tingkat daerah. Dengan menempatkan siswa-siswa di sekolah yang terdekat dengan tempat tinggalnya, pemerintah dapat mengurangi biaya transportasi siswa dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran pendidikan. Selain itu, dengan jumlah siswa yang terdistribusi merata, sekolah-sekolah yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal dan dapat terhindar dari kondisi sekolah yang kosong kelas atau kurang siswa.

Dalam jangka panjang, sistem zonasi juga bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dengan peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pendidikan, diharapkan akan tercipta keadilan sosial dan ekonomi yang lebih baik. Hal ini akan berdampak positif pada kualitas sumber daya manusia Indonesia, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Namun, sistem zonasi juga memiliki beberapa tantangan dan kekurangan yang perlu diatasi. Misalnya, ada kekhawatiran bahwa sistem ini dapat mengurangi kualitas pendidikan karena siswa hanya memilih sekolah berdasarkan jarak dan bukan berdasarkan kualitas sekolah tersebut. Selain itu, sistem zonasi juga memerlukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan atau kecurangan dalam

pendaftaran.

B. Kajian Teori

a. Teori Interaksionisme Simbolik George Harbert Mead

Mead, dengan pemikiran orisinalnya, membuat pencatatan kontribusinya kepada ilmu sosial dengan memperkenalkan "*the theoretical perspective*" yang kemudian berkembang menjadi dasar dari "Teori Interaksi Simbolik." Selama hidupnya, Mead terkenal sebagai seorang pakar psikologi sosial yang memberikan sumbangan berharga bagi ilmu sosiologi. Ia menjalani masa tinggal di Chicago selama 37 tahun hingga wafat pada tahun 1931.

Teori Interaksi Simbolik, yang baru muncul dalam domain studi ilmu komunikasi sekitar awal abad ke-19, terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Dalam perkembangannya, Teori Interaksi Simbolik secara tidak langsung telah menjadi salah satu cabang dalam bidang sosiologi yang dipandang dari perspektif interaksional.

Interaksi Simbolik dapat dianggap sebagai salah satu sudut pandang dalam studi komunikasi yang mungkin paling berorientasi pada aspek "humanis." Dalam perspektif ini, pentingnya individu dan nilai-nilai yang mereka bawa sangat ditekankan, melebihi pengaruh nilai-nilai yang telah ada sebelumnya. Perspektif ini menganggap setiap individu memiliki keunikan budaya dan berinteraksi dalam lingkungan sosial mereka, menghasilkan makna "pemikiran bersama" yang disepakati oleh masyarakat. Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa setiap bentuk interaksi sosial yang dilakukan oleh individu mempertimbangkan aspek individu itu sendiri, yang merupakan salah satu karakteristik dari perspektif interaksional yang menganut aliran Interaksi Simbolik.

Teori Interaksi Simbolik memberikan penekanan pada hubungan antara simbol dan interaksi, dengan inti dari pendekatan ini adalah peran individu. Banyak ahli yang mendukung perspektif ini berpendapat bahwa individu merupakan elemen yang paling krusial dalam konsep sosiologi. Mereka menyatakan bahwa individu adalah objek yang bisa dianalisis secara langsung melalui interaksi mereka dengan individu lainnya.

Interaksi simbolik ada karena ide-ide dasar yang membentuk makna yang berasal dari pikiran manusia tentang diri mereka sendiri dan bagaimana mereka berinteraksi dalam masyarakat, dengan tujuan akhir untuk memediasi serta menginterpretasi makna di dalam komunitas di mana individu tersebut berada. Makna ini timbul dari proses interaksi, dan tidak ada cara lain untuk membentuk makna selain melalui pembentukan hubungan dengan individu lain melalui interaksi.

b. Teori Fungsional William F. Ogburn

Menurut Ogburn, masyarakat terdiri dari berbagai bagian atau lembaga yang saling berinteraksi dan berfungsi bersama untuk mencapai tujuan bersama. Setiap lembaga memiliki tugas khusus dan harus menjalankan fungsinya dengan baik agar masyarakat dapat berfungsi dengan baik pula.

Ogburn juga mengemukakan bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan dan adaptasi. Proses ini dikenal sebagai "diferensiasi fungsional", di mana masyarakat secara bertahap membagi tugas dan fungsi ke dalam lembaga-lembaga yang lebih khusus dan terpisah satu sama lain. Contohnya adalah terjadinya pemisahan antara fungsi agama dan negara.

Namun, Ogburn juga mengakui bahwa perubahan dalam masyarakat tidak

selalu berjalan dengan baik. Terdapat juga ketegangan atau konflik antarlembaga yang dapat mengganggu stabilitas dan keseimbangan masyarakat. Oleh karena itu, menurut Ogburn, penting bagi masyarakat untuk mempertahankan keseimbangan dan stabilitas melalui koordinasi dan integrasi antarlembaga.

Teori ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar penyebab perubahan sosial yang berasal dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi sosial yang mempengaruhi mereka secara pribadi. Teori ini berhasil menjelaskan perubahan sosial yang bersifat moderat. Dalam kerangka fungsionalis, konsep "*cultural lag*" yang dikemukakan oleh William F. Ogburn bertujuan untuk menjelaskan perubahan sosial. Menurutnya, meskipun unsur-unsur masyarakat saling terhubung satu sama lain, beberapa unsur lainnya tidak berubah secepat yang lain, sehingga tertinggal di belakang. Hal ini mengakibatkan kesenjangan sosial dan budaya antara unsur-unsur yang berubah sangat cepat dan unsur-unsur yang berubah sangat lambat (Dany, n.d.).

Teori Fungsional William F. Ogburn dan sistem zonasi dalam pendidikan adalah dua kerangka pemikiran yang dapat secara sinergis menyumbangkan pandangan dan solusi untuk tantangan dalam mencapai keseimbangan sosial dan peluang pendidikan yang merata dalam masyarakat. Teori Fungsional Ogburn menawarkan pemahaman tentang bagaimana masyarakat berfungsi sebagai suatu sistem dengan berbagai elemen yang berinteraksi untuk menjaga stabilitas. Dalam pandangan Ogburn, perubahan sosial terjadi ketika ada disjungsi atau ketidakcocokan antara elemen-elemen tersebut. Dalam konteks pendidikan, hal ini dapat diterjemahkan sebagai perbedaan dalam akses dan

kualitas pendidikan di antara berbagai kelompok masyarakat.

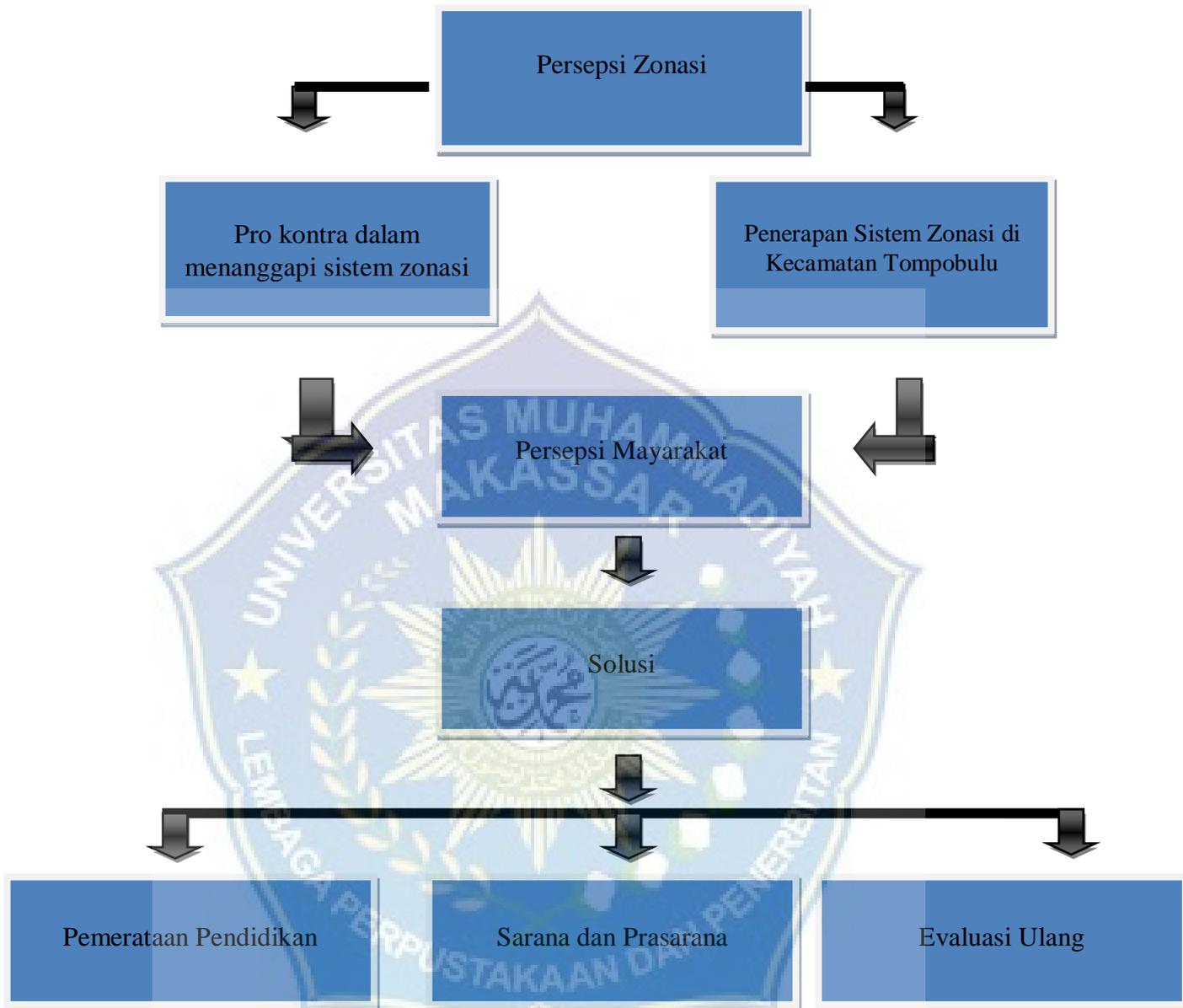
Teori Fungsional Ogburn dan sistem zonasi dalam pendidikan dapat dianggap sebagai dua alat yang dapat bekerja bersama untuk mengatasi tantangan ketidaksetaraan dalam akses pendidikan dan menjaga keseimbangan sosial. Keduanya memperkuat satu sama lain dalam usaha untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan menerapkan pandangan teoritis pada solusi praktis, kita dapat menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan dalam sistem pendidikan dan masyarakat secara keseluruhan.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka berpikir juga merupakan sintesis mengenai hubungan antara variabel yang disusun dari banyak teori yang telah dideskripsikan. Kerangka berpikir adalah yang bersifat konseptual mengenai masalah yang akan diteliti. Kerangka berpikir digunakan untuk menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel yang akan diteliti.

Melalui pendidikan, seseorang akan diukur potensi diri yang dimiliki terhadap karir yang harus disiapkan untuk menghadapi masa depan. Tentunya, system dalam Pendidikan juga mesti berkualitas sebagai pendukung. Salah satu system yang diterapkan pemerintah adalah system zonasi.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



D. Hasil Penelitian Terdahulu

Sistem zonasi dalam pendidikan dapat menimbulkan berbagai tanggapan dari orang tua. Beberapa orang tua mungkin menyukai sistem zonasi karena dapat memberikan kepastian dan keteraturan dalam menentukan sekolah yang

anaknya dapat masuk. Sistem ini juga dapat mengurangi kemungkinan anak harus bersekolah jauh dari rumah dan memungkinkan anak untuk bergabung dengan teman sekelas yang tinggal di sekitar lingkungan yang sama.

Namun, beberapa orang tua mungkin tidak setuju dengan sistem zonasi karena dapat membatasi pilihan sekolah bagi anak mereka. Oleh karena itu pada penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan bagaimana perspektif dari orang tua siswa dan tentunya berbeda dengan penelitian terdahulu.

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dicantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Nandy Agustin Syakarofath, Ahmad Sulaiman, Muhamad Faqih Irsyad, “Kajian Pro Kontra Penerapan Sistem Zonasipendidikan Di Indonesia”	Dalam penelitian ini pihak yang pro terhadap implementasi sistem zonasi dari sisi keber- manfaatannya objektif program tersebut, yaitu pemerataan kualitas akses pendidikan. Kedua, pihak yang kontra tampaknya lebih melihat kelemahan sistem zonasi dari aspek kesiapan pelaksanaan teknis yang kurang optima.	Pada penelitian ini mencakup pro kontra bukan hanya dari kalangan orang tua tapi dari berbagai aspek masyarakat seperti pihak sekolah, peserta didik, dan orang tua.

2	Dany Miftahul Ula, Irvan Lestari, “Dampak Sistem Zonasi bagi Sekolah Menengah Pertama”	Pada penelitian ini membuah hasil, dampak yang ditimbulkan dari adanya kebijakan sistem zonasi di tahun 2019, baik dampak yang bersifat positif maupun dampak yang bersifat negatif terhadap sekolah dan masyarakat.	Lebih mengarah pada dampak yang diakibatkan oleh kebijakan system zonasi di sekolah menengah pertama. Guru, murid dan masyarakat yang menjadi focus utama.
3	Gunarti Ika Pradewi, Rukiyati, “Kebijakan Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan”	(1) zonasi memudahkan akses layanan pendidikan, (2) zonasi pemeratakan kualitas sekolah, (3) zonasi menurunkan kualitas sekolah, (4) zonasi tidak cocok ditetapkan di tingkat SMA, (5) sistem zonasi membatasi siswa memilih sekolah, (6) kebijakan zonasi harus disertai pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, dan (7) zonasi merusak kebhinekaan. Perspektif-perspektif tersebut masing-masing muncul berdasarkan pemahaman,	Dalam penelitian ini, kita berfokus melihat penerapan system zonasi di sekolah melalui perspektif Pendidikan.

		perasaan dan pengalaman yang telah dialami dengan kebijakan sistem zonasi.	
4	Hasbullah, Syaiful Anam, “Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Di Kabupaten Pamekasan”	Hasil dari penelitian tersebut adalah kebijakan system zonasi sudah dillaksanakan tetapi masih banyak kekurangannya seperti kurangnya sosialisasi mengenai kuota yang harus diterima sekolah.	Pada penelitian ini berusaha menunjukkan bagaimana hasil dari diterapkannya system zonasi.
5	Vinggi Oktaviari, “Model Sistem Zonasi Dari Perspektif Teori Keadilan John Rawls”	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan sosial terbagi menjadi dua konsepsi yakni umum dan khusus dimana dalam pelaksanaan sistem zonasi muncul ketimpangan antara masyarakat yang memperoleh keadilan dan ketidakadilan. Konsepsi umum dan	Pada penelitian menunjukkan bagaimana kita memandang kebijakan system zonasi dari teori keadilan john rawls.

		<p>konsepsi khusus dalam justice as fairness terwujud dalam prosentase kuota 15% bagi siswa dengan jalur prestasi, 5% untuk keluarga tidak mampu dan pindah tugas orang tua serta 80% jalur sistem zonasi. Sistem zonasi sebagai perwujudan keadilan sosial di Blitar Raya tergambar dari upaya pemerintah dalam menjawab demo dengan menaikkan kuota jalur sistem zonasi untuk mengurangi ketegangan dan gesekan pada saat Penerimaan Peserta Didik berlangsung.</p>	
--	--	---	--

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif merupakan jenis pendekatan dalam penelitian yang berfokus pada pengumpulan data dengan menggunakan metode deskriptif dan interpretatif untuk memahami fenomena yang diteliti. Salah satu jenis penelitian kualitatif yang umum dilakukan adalah studi kasus.

Studi kasus adalah jenis penelitian kualitatif yang mendalam dan detail terhadap satu kasus atau objek tertentu, seperti individu, kelompok, organisasi, atau peristiwa. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif karakteristik, kondisi, dan konteks dari kasus yang diteliti, serta memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang terjadi.

Dalam melakukan studi kasus, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara mendalam dan interpretatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kasus yang diteliti.

Laporan penelitian ini berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan secara jelas. Peneliti akan mengkaji permasalahan secara langsung dengan sepenuhnya melibatkan diri pada situasi yang diteliti dan mengkaji buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan tersebut (Hartanti, 2017).

Berdasarkan hal tersebut maka relevan jika penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Tujuan penggunaan penelitian studi kasus adalah tidak sekedar untuk menjelaskan seperti apa objek yang diteliti, tetapi untuk menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut dapat terjadi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

a) Lokasi Penelitian

lokasi penelitian di Kecamatan Tompobulu yang berada di kabupaten Bantaeng memiliki alasan yang kuat untuk menggali dan memahami lebih dalam mengenai sistem zonasi dalam pendidikan. Lokasi ini memiliki potensi untuk memberikan wawasan tentang implementasi sistem zonasi di lingkungan yang spesifik. Mengamati bagaimana sistem zonasi diaplikasikan dalam konteks kecamatan dapat memberikan pemahaman tentang tantangan dan dampak yang timbul dalam mengatur distribusi siswa berdasarkan wilayah geografis.

Tabel 3.1 Rancangan Kriteria Lokasi Penelitian

Rancangan Kriteria Penelitian Lokasi Penelitian	
Lokasi Penelitian	Penelitian terkait dengan persepsi masyarakat mengenai kebijakan system zonasi di kecamatan Tompobulu yang dilaksanakan di Kabupaten Bantaeng Kecamatan Tompobulu Kelurahan Ereng-Ereng.
Peristiwa / Persoalan (isu)	Berkaitan kebijakan system zonasi yang diterapkan pemerintah, peneliti ingin melihat bagaimana persepsi dari masyarakat mengenai kebijakan tersebut.

b) Waktu Penelitian

Tabel 3.2 Waktu Penelitian

No	Nama Kegiatan	Bulan I				Bulan VI				Bulan VIII			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Pengusulan Judul	■											
2	Penyusunan Proposal									■			
3	Konsultasi Pembimbing				■								
4	Seminar Proposal						■						
5	Pengurusan Izin Penelitian								■				
6	Seminar Hasil												

C. Fokus Penelitian

Fokus utama peneliti dalam rangka pelaksanaan penelitian ini adalah untuk menggali secara mendalam bagaimana masyarakat di sekitar Kecamatan Tompobulu merespon dan menghadapi kebijakan sistem zonasi yang telah diterapkan. Keputusan implementasi sistem zonasi memiliki konsekuensi yang luas, dan penelitian ini bertujuan untuk mengungkap berbagai pandangan, sikap, serta solusi yang muncul dari berbagai pihak yang terlibat. Salah satu kelompok yang sangat terpengaruh adalah masyarakat. Peneliti akan mencoba memahami perspektif masyarakat terkait dengan sistem zonasi, apakah mereka merasa sistem ini adil, efektif, dan apakah mereka memiliki alternatif dalam memilih sekolah untuk anak-anak mereka. Di samping itu, melibatkan masyarakat juga penting untuk mengevaluasi dampak sosial dari sistem zonasi ini. Bagaimana masyarakat menghadapi perubahan dalam dinamika sekolah di lingkungan mereka merupakan aspek-aspek yang perlu dijelajahi.

penelitian akan menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan, dengan menggali pandangan dan pengalaman dari berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, pendekatan yang

mendalam dalam penelitian ini akan memberikan wawasan tentang dinamika sistem zonasi di masyarakat sekitar kecamatan Tompobulu.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian, informan merujuk pada individu yang bisa memberikan data atau informasi tentang topik atau masalah yang sedang diteliti. Pada penelitian kualitatif, terdapat dua jenis informan yang dapat dibedakan, yaitu informan utama dan informan pendukung. Mereka semua memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang berguna dalam penelitian (Heryana et al., 2018).

Dalam penelitian kualitatif, informan utama dapat diibaratkan sebagai "tokoh utama" dalam sebuah cerita. Oleh karena itu, informan utama merupakan orang yang memiliki pengetahuan teknis dan detail tentang masalah yang akan diteliti (Heryana et al., 2018).

Informan pendukung dalam penelitian kualitatif adalah individu yang memberikan data atau informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan. Mereka memberikan informasi yang dapat melengkapi data dari informan utama atau informan kunci dan kadang-kadang memberikan informasi yang belum diberikan oleh kedua jenis informan tersebut (Heryana et al., 2018).

Dengan mempertimbangkan penjelasan sebelumnya, peneliti akan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informannya. Teknik ini menentukan informan berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu yang terkait dengan masalah penelitian, bukan berdasarkan strata, kedudukan, aturan, atau wilayah tertentu.

Kriteria pemilihan informan :

- a) Masyarakat kecamatan Tompobulu
- b) Domisili di Kecamatan Tompobulu
- c) Orang tua siswa
- d) Berusia 17-50 tahun

Yang menjadi informan penelitian adalah :

- a) Informan utama, yakni masyarakat Kecamatan Tompobulu
- b) Informan pendukung, yaitu guru dari Mts. Muhammadiyah Ereng-Ereng dan kepala Lurah Kelurahan Ereng-Ereng

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Alasan peneliti menggunakan metode ini karena metode kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari hasil observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh peneliti berasal dari hasil observasi langsung yang dilakukan peneliti dilapangan tepatnya di kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber kedua yang dapat diperoleh dari dokumen berupa buku, jurnal, blog, web dan arsip yang terkait dengan tujuan penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Sebagai alat kunci dalam penelitian, peneliti harus memiliki pengetahuan teori dan pemahaman yang luas untuk dapat mengajukan pertanyaan, menganalisis, dan mengonstruksi objek penelitian agar menjadi lebih jelas. Ada dua jenis instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti, yaitu instrumen pokok dan penunjang. Instrumen pokok dalam penelitian adalah peneliti itu sendiri sebagai manusia yang melakukan penelitian, sedangkan instrumen penunjang meliputi kamera, telepon genggam sebagai alat perekam, dan pensil, pulpen, dan buku sebagai alat untuk mencatat data. Kamera digunakan untuk merekam peristiwa penting dalam observasi dalam bentuk foto atau video, sedangkan alat perekam suara digunakan untuk merekam data yang diambil melalui metode wawancara atau observasi. Pensil, pulpen, dan buku digunakan untuk mencatat informasi yang diperoleh dari narasumber.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan berbagai metode dan teknik pengumpulan data yang tepat dengan tujuan untuk memperoleh data yang objektif. Salah satu metode yang digunakan adalah penelitian lapangan, di mana penulis melakukan penelitian langsung pada objek yang akan diteliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara

intensif latar belakang keadaan sekarang, interaksi lingkungan, dan unit sosial seperti individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis melakukan riset lapangan di lokasi yang dituju untuk memperoleh data secara konkret (Mulyawan, 2018).

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai proses pengamatan yang cermat terhadap suatu fenomena. Menurut Hadi, observasi merupakan salah satu metode ilmiah yang melibatkan kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang fenomena yang sedang diselidiki, baik melalui pengamatan langsung ataupun tidak langsung (Hartanti, 2017).

Untuk menggunakan observasi sebagai alat pengumpulan data, diperlukan sistematis dalam pengamatannya. Ini berarti observasi dan pencatatan dilakukan dengan mengikuti prosedur dan aturan tertentu sehingga dapat di replikasi oleh peneliti lain. Selain itu, hasil observasi harus memberikan kesempatan untuk ditafsirkan secara ilmiah. Oleh karena itu, metode observasi harus dilakukan dengan cara yang memungkinkan validitas dan reliabilitasnya diuji, sehingga dapat digunakan sebagai dasar ilmiah untuk generalisasi. Tujuan observasi untuk variabel yang akan diselidiki harus dijelaskan secara eksplisit, dan konsep yang diselidiki harus dirumuskan sedetail mungkin. Tujuan yang jelas dapat membantu memusatkan perhatian pada hal-hal yang relevan, karena dalam praktiknya, peneliti dapat menghadapi banyak kesan yang tidak terkait dengan tujuan

penelitian. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, peneliti dapat memusatkan penelitiannya pada apa yang harus diamati, siapa yang harus diamati, dan data apa yang perlu dikumpulkan. Melalui observasi, kita dapat mengetahui kebenaran pandangan teoritis tentang masalah yang sedang diselidiki dalam hubungannya dengan kenyataan (Mulyawan, 2018).

Peneliti melakukan pengamatan terhadap persektif masyarakat terhadap kebijakan system zonasi yang sudah diterapkan di beberapa wilayah, termasuk di kecamatan Tompobulu kabupaten Bantaeng.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data dengan cara langsung bertanya kepada responden. Dalam proses wawancara, peneliti dan responden melakukan percakapan tatap muka, di mana informasi dan keterangan-keterangan yang diinginkan diperoleh melalui tanya jawab yang dilakukan secara langsung. Wawancara bisa dilakukan oleh satu orang atau lebih dan berlangsung dalam suasana yang terstruktur (Mulyawan, 2018).

Tujuan dari wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi dari responden, bukan untuk mempengaruhi atau mengubah pendapat mereka. Wawancara merupakan bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari responden melalui pertanyaan dan jawaban secara lisan. Biasanya, komunikasi ini dilakukan secara tatap muka, namun bisa juga dilakukan melalui telepon atau dengan lebih dari dua orang. Keterampilan dalam mengajukan pertanyaan dan menangkap pikiran atau perasaan responden, serta kemampuan merumuskan pertanyaan baru dengan

cepat menjadi penting dalam proses wawancara untuk memperoleh keterangan yang diperlukan (Mulyawan, 2018).

c. Dokumentasi

Rusydi mendefinisikan dokumentasi sebagai suatu metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan informasi dari peninggalan tertulis seperti arsip, buku, dan dokumen lain yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumen-dokumen tersebut dapat berisi pendapat, teori, dalil-dalil, hukum, atau informasi lain yang relevan dengan topik penelitian. Sebagai sumber informasi, semua dokumen yang terkait dengan penelitian harus dicatat dengan teliti (Mulyawan, 2018).

H. Teknik Analisis Data

Untuk dapat memberikan kesimpulan yang dapat dipercaya, data yang terkumpul perlu dianalisis dengan teknik analisis yang sesuai. Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif karena mayoritas data bersifat kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan pemecahan masalah berdasarkan data yang ada, dan melibatkan presentasi data, analisis, dan interpretasi data. Penelitian deskriptif juga mencakup perbandingan dan korelasi, serta fokus pada fakta dan sifat populasi secara sistematis dan faktual. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif (Mulyawan, 2018).

Analisa kualitatif yaitu mendeskripsikan fenomena secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – fakta serta hubungan antara fenomena – fenomena yang di selidiki pada fakta yang ada di lokasi penelitian tentang

perspektif masyarakat mengenai kebijakan system zonasi di kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.

I. Teknik Keabsahan Data

Beberapa kriteria yang diperlukan untuk menentukan keabsahan data penelitian akan dirumuskan dengan tepat. Dalam penelitian ini, ada beberapa teknik yang harus digunakan untuk memeriksa keabsahan data, antara lain kreadibilitas yang dapat dibuktikan melalui perpanjangan keikutsertaan, ketekunan, pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, serta penggunaan kriteria kepastian melalui teknik uraian rinci dan audit kepastian (Hartanti, 2017).

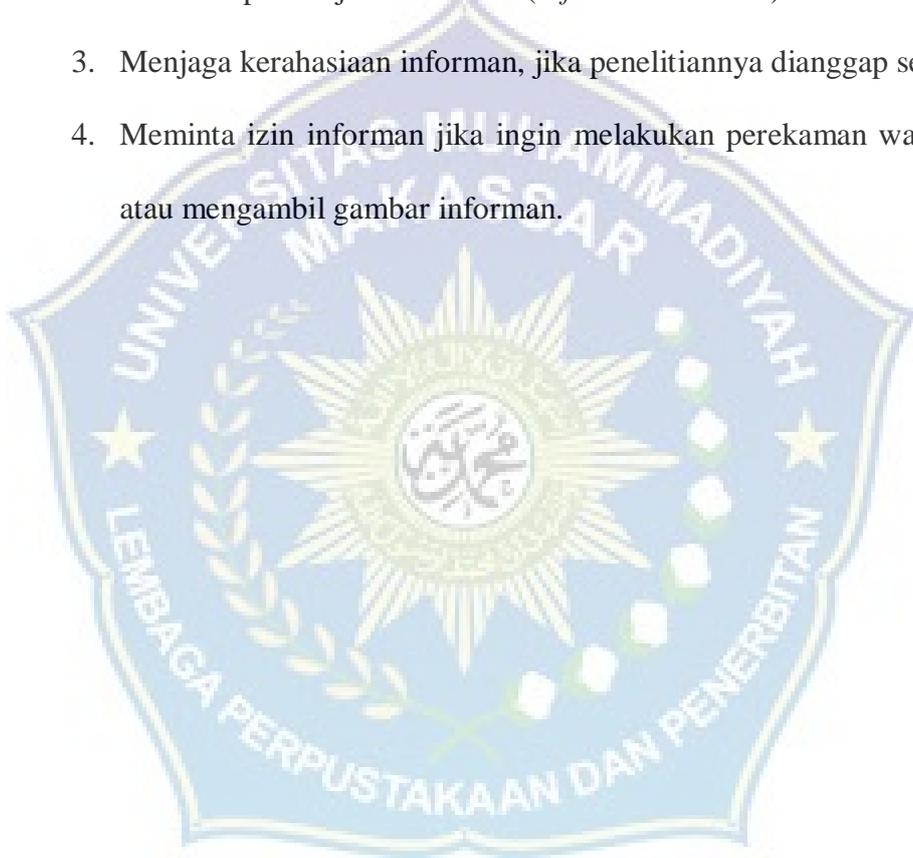
Dalam penelitian, penting untuk melakukan pengecekan kebenaran data yang telah dikumpulkan dengan teknik yang disebut validitas data. Untuk memastikan validitas data, dilakukan suatu teknik pemeriksaan yang disebut triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data dengan menggunakan sumber lain selain data tersebut untuk melakukan pengecekan atau membandingkan dengan data yang telah dikumpulkan (Hartanti, 2017).

Pernyataan tersebut memiliki arti bahwa untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendalam dan valid, digunakanlah metode triangulasi yang dapat meningkatkan validitas. Dalam hal ini, jika data yang diperoleh dari sumber pertama masih kurang memadai, maka diperlukan sumber data lain yang terkait dengan penelitian tersebut untuk memperkuat kepercayaan pada data yang diperoleh. Oleh karena itu, tidak hanya satu sumber data yang digunakan dalam penelitian, melainkan berasal dari beberapa sumber yang relevan dengan topik penelitian.

J. Etika Penelitian

Etika penelitian adalah standar tata perilaku peneliti selama melakukan penelitian, mulai dari menyusun desain penelitian, mengumpulkan data lapangan (melakukan wawancara, observasi, dan pengumpulan data dokumen), menyusun laporan penelitian hingga mempublikasi hasil penelitian.

1. Menginformasikan tujuan penelitian kepada informan
2. Meminta persetujuan informan (*Informan Consent*)
3. Menjaga kerahasiaan informan, jika penelitiannya dianggap sensitif.
4. Meminta izin informan jika ingin melakukan perekaman wawancara, atau mengambil gambar informan.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Tompobulu

Tompobulu terletak di lereng pegunungan Lompobattang, dan tidak mengherankan mengapa namanya berasal dari bahasa Konjo yang terdiri dari dua kata, yaitu "tomp" yang berarti puncak dan "bulu" yang berarti gunung. Selain itu, Tompobulu juga merupakan tempat tinggal bagi penduduk asli yang berbicara dalam bahasa Konjo. Di sekitar Tompobulu, terdapat dua sungai terkenal, yaitu sungai Bialo dan sungai Ompoa, yang Tompobulu berada tepat di tepian keduanya. Sungai-sungai ini saling terhubung melalui sungai Sawere dan mengalir menuju muara di Teko, yang terletak di wilayah timur Bulukmba.

Kecamatan Tompobulu, dengan karakteristiknya yang unik dan beragam, dapat ditemukan sebagai salah satu dari delapan kecamatan yang secara geografis terletak dalam wilayah Kabupaten Bantaeng. Terletak di bagian selatan Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Tompobulu memiliki sejumlah ciri khas geografis dan budaya yang membedakannya dari kecamatan-kecamatan lainnya di wilayah ini. Dengan populasi yang beragam etnis dan latar belakang sosial, Kecamatan Tompobulu juga menjadi tempat di mana berbagai tradisi dan kearifan lokal berkumpul dan tumbuh bersama, menciptakan sebuah keragaman yang kaya dan menarik.

B. Letak Geografi

Kecamatan Tompobulu terletak di daerah perbukitan dengan jarak lebih dari 20 kilometer dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten. Wilayah Kecamatan

Tompobulu terbagi menjadi 10 Kelurahan, yang mencakup Kelurahan Pattaneteang (1.304 Ha), Kelurahan Labbo (1.583 Ha), Kelurahan Bonto Tappalang (525 Ha), Kelurahan Balumbang (379 Ha), Kelurahan Erengereng (477 Ha), Kelurahan Campaga (447 Ha), Kelurahan Banyorang (502 Ha), Kelurahan Lembang Gantarang Keke (719 Ha), Kelurahan Patalassang (1.178 Ha), dan Kelurahan Bonto Bontoa (362 Ha).

Secara administrasi, batas wilayah Kecamatan Tompobulu sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba dan Kec.Eremerasa.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan kec.Gatarangkeke dan kec. Bantaeng
- d. Sebelah barat berbatasan dengan kec.Eremerasa dan Kec. Bantaeng

C. Keadaan Sosial

Dalam konteks perencanaan pengembangan pembangunan suatu wilayah, pertimbangan yang sangat penting adalah memeriksa aspek demografi. Sebagai contoh, ketika mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana di suatu daerah, informasi mengenai data kependudukan serta aspek sosial budaya, seperti kearifan lokal, menjadi fokus utama. Dalam hal ini, data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik menjadi sumber informasi yang sangat berharga. Berdasarkan data ini, kita dapat mengetahui bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Tompobulu mencapai sekitar 23.471 jiwa. Informasi ini sangat penting dalam mengarahkan pengembangan wilayah secara efektif dan memastikan bahwa kebutuhan serta karakteristik penduduk setempat terpenuhi

dengan baik dalam proses pembangunan.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk

No	Kelurahan	Penduduk (jiwa)	Persentase
1	Lembang Gantarang Keke	3.595	15.32%
2	Pattalasang	3.106	13.23%
3	Bonto-Bontoa	1 901	8.10%
4	Banyorang	2 968	12.65%
5	Campaga	1 928	8.21%
6	Bonto Tappalang	1 305	5.56%
7	Balumbung	1 902	8.10%
8	Ereng-Ereng	1 791	7.63%
9	Labbo	3 065	13.06%
10	Pattaneteang	1 910	8.14%
	Kecamatan Tompobulu	23 471	100%

Belajar tentang jumlah kelurahan di Kabupaten Bantaeng yang terdiri dari sepuluh kelurahan. Kelurahan Gantarang Keke adalah kelurahan dengan jumlah penduduk terbesar, mencapai 3.595 jiwa. Disusul oleh Kelurahan Pattalasang yang memiliki 3.106 penduduk, yang merupakan 13.23% dari total populasi keseluruhan sebanyak 23.471 jiwa di wilayah Kecamatan Tompobulu. Sedangkan, Kelurahan Ereng-ereng memiliki populasi sebanyak 1.791 jiwa.

D. Keadaan Pendidikan

Kecamatan Tompobulu, yang berlokasi di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, adalah sebuah wilayah yang kaya akan potensi pendidikan. Saat ini,

tercatat sebanyak 62 sekolah beroperasi di Kecamatan Tompobulu, termasuk berbagai tingkatan pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga tingkat menengah. Keberadaan sekolah-sekolah ini mencerminkan komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat di Kecamatan Tompobulu, sekaligus membuka peluang pendidikan yang lebih luas bagi generasi muda di wilayah ini. Dengan berbagai pilihan sekolah yang tersedia, diharapkan penduduk setempat dapat meraih pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk masa depan yang lebih cerah dan berkontribusi positif pada pembangunan daerah ini.

Mempertimbangkan jumlah siswa, maka pemerintah daerah kabupaten Bantaeng menetapkan kecamatan Tompobulu sebagai satu zona dalam pembagian sistem zonasi di kabupaten Bantaeng. Artinya desa-desa atau kelurahan di kecamatan Tompobulu bisa keluar dari wilayah mereka untuk sekolah dengan syarat tidak keluar dari wilayah Kecamatan Tompobulu sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Sistem Zonasi di Kecamatan Tompobulu

Pemahaman seseorang adalah hal yang kompleks dan bervariasi, dan untuk dapat memahami secara mendalam suatu hal, perlu ada tinjauan yang cermat terkait dengan pengetahuan yang dimiliki individu terhadap suatu masalah. Pengetahuan menjadi fondasi utama dalam proses pemahaman, karena informasi, fakta, dan konsep yang dimiliki seseorang membentuk landasan bagi pemahaman yang lebih kompleks dan berarti.

Dalam menghadapi suatu masalah, pemahaman individu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat pendidikan, pengalaman hidup, interaksi sosial, dan akses terhadap informasi. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi seringkali berarti paparan terhadap lebih banyak pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam terhadap berbagai masalah. Sementara itu, pengalaman hidup dan interaksi sosial dapat membentuk perspektif unik seseorang terhadap suatu masalah tertentu, membuka peluang untuk melihatnya dari berbagai sudut pandang. Sehingga perspektif terhadap sistem zonasi yang dikemukakan juga dapat berbeda-beda.

Seperti halnya yang dikatakan Ibu SS salah satu Masyarakat yang ada di Kelurahan Ereng-Ereng,

“pembatasan kecenderungan orang tua untuk memilih sekolah dalam menyekolahkan anaknya.”

Dalam wawancara dengan Ibu SS, beliau menyampaikan pandangannya

bahwa tujuan dari sistem zonasi dalam dunia pendidikan adalah untuk membatasi kecenderungan orang tua dalam memilih sekolah bagi anak-anak mereka. Menurut Ibu SS, sistem zonasi dianggap sebagai upaya untuk mengurangi persaingan dan tekanan dalam proses pendaftaran di sekolah-sekolah yang populer. Oleh karena itu, pendekatan zonasi dianggap sebagai langkah untuk menjaga keseimbangan jumlah siswa di berbagai sekolah dan memperluas aksesibilitas pendidikan yang inklusif.

Beda halnya yang dikatakan Ibu SY, salah satu Masyarakat yang ada di Kelurahan Ereng-Ereng,

“salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam hal pemerataan yah, pemerataan distribusi atau area penyebaran peserta didik ke berbagai sekolah dengan menerapkan sistem zonasi.”

Hasil wawancara dengan Ibu SY mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah yang mengadopsi sistem zonasi merupakan upaya untuk menjaga distribusi yang merata dari siswa ke berbagai sekolah. Sistem zonasi dianggap sebagai metode yang digunakan untuk mengatur penyebaran siswa ke sekolah-sekolah dengan mematuhi pembagian wilayah yang telah ditentukan.

Pernyataan yang berbeda juga dikatakan Bapak BR, salah satu Masyarakat yang ada di Kelurahan Ereng-Ereng,

“pengurangan kebebasan mereka untuk mencari tempat pendidikan yang menurut mereka yang terbaik.”

Bapak BR menyimpulkan bahwa menurutnya, penerapan sistem zonasi dapat diartikan sebagai pembatasan terhadap kebebasan orang tua dalam memilih pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka.

Dari beberapa narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap Masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap kebijakan sistem

zonasi. Ada yang memandangnya sebagai bentuk pemerataan dan juga sebagai pembatasan dalam memilih sekolah.

a. Pendukung (Pro) Terhadap Sistem Zonasi

Beberapa anggota masyarakat mendukung sistem zonasi karena dianggap sebagai solusi untuk menyediakan akses pendidikan yang lebih merata dan membantu mengatur dan membagi wilayah secara efisien, bahkan mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Pendukung sistem zonasi juga cenderung percaya bahwa ini dapat meningkatkan pemanfaatan sumber daya secara adil dan berkelanjutan di setiap wilayah.

Seperti halnya yang dikatakan Ibu SY, salah satu Masyarakat yang ada di Kelurahan Ereng-Ereng,

“saya pribadi memandang penerapan sistem zonasi ini cukup strategis yah, dalam aspek pemerataan distribusi peserta didik. Mengingat dari tahun ke tahun jumlah sekolah baik itu sekolah negeri atau madrasah mengalami perkembangan buktinya beberapa madrasah atau pondok pesantren bisa berdiri sekalipun tidak berada naungan pemerintah tetapi salah satu tantangan yang dihadapi adalah jumlah penduduk.”

Ibu SY menyimpulkan bahwa menurut pandangannya, penerapan sistem zonasi adalah langkah yang strategis untuk mencapai pemerataan distribusi siswa. Pandangan ini didasarkan pada pertumbuhan jumlah sekolah dari waktu ke waktu, termasuk sekolah negeri dan madrasah yang berkembang, bahkan beberapa di antaranya berdiri tanpa dukungan pemerintah. Namun, tantangan yang dihadapi adalah jumlah penduduk yang mempengaruhi dinamika penerimaan siswa.

Seperti halnya yang dikatakan Ibu RM, salah satu guru di MTs. Muhammadiyah Ereng-Ereng,

“justru bagus lagi di, iya lebih menguntungkan lagi di daerah-daerah yang jauh dari kota karena siswa yang dari des aitu tidak bisa langsung pergi ke kota semua, iya saya mendukung ini sistem zonasi”

Ibu RM menyimpulkan bahwa menurut pandangannya, penerapan sistem zonasi adalah hal yang positif, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Ibu RM melihat bahwa sistem ini memberikan manfaat, terutama bagi siswa dari desa yang sulit untuk langsung pergi ke kota. Dalam pandangan Ibu RM, sistem zonasi merupakan langkah yang layak didukung

Seperti halnya yang dikatakan Bapak AN, kepala lurah Kelurahan Ereng-Ereng,

“alhamdulillah dengan adanya aturan seperti ini, sekira Masyarakat memang bisa perlahan-lahan menyadari bahwa sekolah itu tidak harus di luar daerah.”

Bapak AN menyimpulkan bahwa menurutnya, keberadaan peraturan seperti sistem zonasi telah membantu masyarakat untuk mulai menyadari bahwa memilih sekolah tidak selalu harus di luar daerah. Dalam pandangannya, peraturan ini memberikan kesempatan bagi orang tua dan siswa untuk lebih memahami pentingnya sekolah yang ada di daerah mereka.

Dari beberapa narasumber diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak yang mendukung sistem zonasi karena dianggap sebagai alat untuk meratakan akses pendidikan dengan membagi wilayah menjadi zona-zona tertentu.

b. Menolak (Kontra) Terhadap Sistem Zonasi

Tetapi, dari sudut pandang yang berbeda, ada masyarakat yang menyuarakan kritik terhadap sistem zonasi. Mereka berpendapat bahwa sistem ini cenderung membatasi pilihan sekolah bagi siswa dan berpotensi menghambat mobilitas sosial. Para kritikus ini menganggap bahwa ketika siswa terikat pada

wilayah tertentu, mereka mungkin terbatas dalam mengakses sekolah-sekolah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan pendidikan mereka. Oleh karena itu, bagi mereka yang merasa terdampak negatif oleh sistem zonasi, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik dan sesuai dengan potensi mereka bisa menjadi kurang adil dan terbatas.

Seperti halnya yang dikatakan bapak WH, salah satu Masyarakat kelurahan Ereng-Ereng,

“sistem zonasi ini sangat bagus sebenarnya andaikan pemerintah sudah melakukan semua unsur-unsur yang ada didalamnya, unsur-unsur yang saya maksudkan adalah tingkat pemerataan pendidikan dari segi kualitas itu sudah merata toh baik pada sekolah swasta maupun negeri. Pertanyaannya, apakah itu sudah terpenuhi, kalo belum terpenuhi maka sistem zonasi ini saya anggap masih masih belum pas toh, seperti itu.”

Menurut bapak WH, sistem zonasi memiliki potensi yang positif, tetapi hasilnya sangat bergantung pada implementasinya. Dia berpendapat bahwa keberhasilan sistem zonasi akan tercapai apabila pemerintah berhasil menjamin bahwa semua aspek di dalamnya, termasuk pemerataan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah swasta dan negeri, telah dipenuhi. Menurutnya, jika syarat-syarat tersebut belum terpenuhi, sistem zonasi mungkin belum menjadi solusi yang tepat.

Seperti halnya yang dikatakan ibu SS, salah satu Masyarakat kelurahan Ereng-Ereng,

“kalau saya sebagai warga Masyarakat, kalo saya jujur kurang setuju, yah mengingat ada beberapa sekolah ditempat lain yang mungkin lebih diminati oleh anak. Artinya kita tidak harus sekolah di dekat dengan rumah, artinya begini mungkin diantara sekolah A, B, dan C sekolah A mungkin dekat tetapi saya lebih cenderung ke sekolah C maka dengan otomatis saya akan lebih cenderung menyekolahkan anak saya di sekolah C karena kecenderungan belajar anak saya juga adanya di

sekolah C".

Menurut ibu SS sebagai warga masyarakat, dia condong tidak setuju dengan sistem zonasi. Baginya, memiliki fleksibilitas bagi anak-anak untuk memilih sekolah yang mungkin lebih diinginkan adalah hal penting, bahkan jika sekolah tersebut tidak berlokasi dekat rumah. Ibu SS berpendapat bahwa dalam konteks di mana beberapa pilihan sekolah (A, B, dan C) tersedia, meskipun sekolah A berdekatan, dia lebih memilih sekolah C karena lebih cocok dengan gaya belajar anaknya.

Seperi halnya yang dikatakan oleh bapak BR, salah satu Masyarakat kelurahan Ereng-Ereng,

"kalau secara pribadi sih, saya lebih cenderung tidak ada zonasi karena siswa itu dan orang tua siswa bisa bebas memilih dimana kira-kira anaknya itu atau siswa itu sendiri bisa mengembangkan bakatnya, disekolah mana dia bisa sesuai selera dan keinginannya. Artinya siswa itu lebih leluasa untuk mencari sekolah yang bisa mengembangkan minat dan bakatnya."

Menurut bapak BR dari sudut pandang pribadinya, ia lebih condong untuk tidak mendukung sistem zonasi. Baginya, adalah hal penting bahwa siswa dan orang tua memiliki kebebasan untuk memilih sekolah sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Menurutnya, jika sistem tanpa zonasi diterapkan, siswa akan memiliki keleluasaan dalam mencari sekolah yang sesuai dengan perkembangan minat dan bakat mereka tanpa hambatan.

Dari beberapa narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwa pembatasan pilihan sekolah, menjadi salah satu kritik terhadap sistem zonasi bahwa siswa dan orang tua dapat terbatas dalam memilih sekolah yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Jika sekolah di zona mereka tidak memenuhi

standar baik itu sarana dan prasarannya atau tidak sesuai dengan minat siswa, maka pilihan sekolah menjadi terbatas.

2. Bagaimana Dampak dan Solusi Dalam Merespon Kebijakan Zonasi di Kecamatan Tompobulu

Setelah memaparkan dan menganalisis berbagai persepsi masyarakat mengenai tanggapan terhadap penerapan sistem zonasi di kecamatan Tompobulu, langkah selanjutnya adalah menggali lebih dalam dengan melibatkan orang tua siswa untuk mengetahui berbagai solusi atau harapan yang mereka miliki terkait penerapan sistem zonasi ini untuk masa depan.

Penting untuk di ingat bahwa tidak ada kebijakan yang sempurna, setiap kebijakan memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Begitu juga dengan kebijakan sistem zonasi ini yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk menutupi kekurangan tersebut, diperlukan solusi ataupun harapan dari Masyarakat dan pihak lainnya yang terlibat agar kebijakan ini dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Ibu SS, salah satu Masyarakat Kelurahan Ereng-Ereng,

“kalau saya pribadi saya berharap sistem zonasi ini memang berjalannya efektif yah, tetapi saya rasa itu bukan satu-satunya.”

Kesimpulan Ibu SS adalah bahwa menurutnya, sistem zonasi sebaiknya beroperasi dengan baik, tetapi dia juga berpendapat bahwa sistem zonasi bukanlah solusi tunggal yang diperlukan.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak AN, kepala Lurah Kelurahan Ereng-Ereng,

“aturan ini diharapkan bisa menyadarkan bahwa sekolah di Ereng-Ereng itu memang bagus.”

Bapak AN menyimpulkan bahwa aturan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dikalangan masyarakat, bahwa sekolah di Ereng-Ereng memiliki kualitas yang baik.

Seperti halnya yang dikatakan oleh ibu SY, salah satu masyarakat kelurahan Ereng-Ereng,

“kalau kebijakan sistem zonasi masih dianggap sebagai kebijakan strategis yah, dalam program pemerintah, menurut saya sistem zonasi perlu diterapkan secara maksimal. Wilayahnya perlu dipersempit, mungkin itu juga perlu sehingga potensi madrasah untuk menerima peserta didik itu lebih besar ketika ruang zonasi itu diberlakukan di seluruh lembaga pendidikan, tidak hanya di Lembaga pendidikan naungan pemerintah dengan kata lain dinas pendidikan tapi lembaga pendidikan dibawah naungan kementerian agama juga perlu. Cerintanya pemerintah harus menerapkan kebijakan yang berlaku berimbang antara dinas pendidikan dan kementerian agama yang sama-sama mengelola lembaga pendidikan sehingga pemerataan distribusi peserta didik itu seimbang.”

Menurut ibu SY dalam pandangannya pribadinya, kebijakan sistem zonasi masih dianggap sebagai strategi yang penting dalam program pemerintah. Bagi Ibu SY, optimalisasi penerapan sistem zonasi dengan membatasi wilayahnya menjadi aspek penting. Dia berpendapat bahwa peluang bagi madrasah untuk menerima siswa akan bertambah besar jika sistem zonasi diterapkan di semua lembaga pendidikan, baik di bawah dinas pendidikan maupun kementerian agama. Ibu SY berharap agar pemerintah menerapkan kebijakan yang adil antara dinas pendidikan dan kementerian agama dalam mengelola lembaga pendidikan, guna mencapai pemerataan distribusi siswa yang lebih merata

Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak WH, salah satu masyarakat kelurahan Ereng-Ereng,

“harapan saya terhadap kebijakan ini adalah perlu peninjauan ulang terkait dengan zonasi yah, pada dasarnya saya sangat berharap ini bisa dilakukan secara maksimal dengan tentu melihat atau memantau dari pusat semua lembaga pendidikan itu di perhatikan baik-baik sarana dan prasarananya kalau ini mau dilakukan dengan baik toh. Kemudian yang kedua adalah bukan hanya sarana dan prasarananya tetapi tentu perlu di follow up bagaimana dengan ketenagaan pendidikan, tenaga yang ada didalam lembaga pendidikan apakah sudah memenuhi standar atau tidak toh. Karena biar lengkap sarana dan prasarananya tapi yang mengoperasikan itu belum maksimal tetap juga itu tidak berfungsi semaksimal mungkin baik dari segi kualitasnya dan lain-lain sebagainya toh.”

Menurut bapak WH bahwa harapan yang dimilikinya terhadap kebijakan ini adalah perlunya evaluasi ulang mengenai sistem zonasi. Menurut pandangannya, kebijakan ini perlu diterapkan secara penuh dengan pengawasan pusat terhadap semua lembaga pendidikan, termasuk memeriksa situasi fasilitas serta keunggulan tenaga pengajar di dalamnya. Dia berharap bahwa selain mempertimbangkan aspek fasilitas, juga penting untuk mengikuti perkembangan tenaga pengajar agar kebijakan ini berhasil dengan kualitas pendidikan yang unggul.

Berbeda seperti yang dikatakan oleh Bapak BR, salah satu masyarakat kelurahan Ereng-Ereng,

“kalau menurut saya sebaiknya tidak diterapkan agar bisa bebas memilih sekolah yang diminati. Karena bisa saja orang mencari kualitas sekolah atau mencari jurusan karena tidak semua jurusan ada disini, mungkin siswa itu ada jurusan lain yang ingin dipilih yang ada ditempat lain.”

Menurut bapak BR dalam pandangannya, lebih baik jika sistem zonasi tidak dijalankan, sehingga siswa bisa leluasa memilih sekolah yang cocok dengan minatnya. Menurut Bapak BR, hal ini penting karena beberapa siswa mungkin ingin memilih sekolah berdasarkan kualitas atau untuk mengambil jurusan yang

tidak tersedia di daerah tersebut. Dia percaya bahwa ada kemungkinan beberapa siswa memiliki opsi yang lebih sesuai di tempat lain.

Dari beberapa narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwa mereka mengerti kebijakan ini memiliki tujuan yang baik bahkan ada yang mendukung sepenuhnya agar dilanjutkan meskipun tetap ada yang menolak. Yang di garis bawah juga adalah sebelum menerapkan kebijakan zonasi ini perlunya pemerataan kualitas pendidikan baik itu sarana dan prasarananya maupun kualitas tenaga pendidik agar tidak terjadi kesenjangan antara sekolah satu dan sekolah lainnya.

B. Pembahasan

1. Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Sistem zonasi di Kecamatan Tompobulu

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), zonasi didefinisikan sebagai pengelompokan atau pembagian suatu wilayah menjadi beberapa bagian sesuai dengan tujuan pengelolaan dan fungsinya. Istilah ini pertama kali digunakan pada tahun 2017 untuk menyusun sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018. Menurut (Madiana et al., 2022), tujuan dari sistem zonasi ini adalah untuk memastikan kesetaraan akses terhadap layanan pendidikan bagi para peserta didik. Sistem ini berusaha untuk mendekatkan hubungan antara lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga serta mengurangi ketidakmerataan dan sikap superioritas di sekolah.

Persepsi masyarakat yang pro dan kontra terhadap kebijakan sistem zonasi dalam pendidikan juga dapat tercermin dari berbagai argumen yang mereka

kemukakan. Kelompok yang mendukung sistem zonasi berpendapat bahwa kebijakan ini dapat membantu mengurangi kesenjangan antara sekolah-sekolah yang terlalu diminati dan sekolah-sekolah yang kurang diminati. Mereka melihat bahwa sistem ini bisa memberikan kesempatan yang lebih adil bagi siswa dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, tanpa terbebani dengan persaingan yang berlebihan. Di samping itu, mereka percaya bahwa sistem zonasi juga dapat mendorong terbentuknya komunitas lokal yang lebih kuat, karena anak-anak dari wilayah yang sama dapat bersekolah bersama dan mengembangkan hubungan sosial yang lebih erat.

Konsep konstruksi sosial dalam teori Interaksionisme Simbolik juga berlaku untuk cara masyarakat menciptakan makna tentang dampak sistem zonasi di sekolah. Masyarakat bersama-sama menciptakan pemahaman dan persepsi mereka tentang sistem ini melalui interaksi sosial, diskusi, dan simbol-simbol yang digunakan dalam komunikasi mereka. Pemahaman bersama ini dapat memengaruhi bagaimana masyarakat memandang dampak sistem zonasi terhadap prestasi siswa, kesetaraan akses pendidikan, atau pengalaman siswa secara keseluruhan. Teori Interaksionisme Simbolik menyoroti pentingnya simbol-simbol dalam pembentukan makna dalam interaksi sosial. Dalam konteks sistem zonasi sekolah, simbol seperti pembagian zona, dapat memberikan makna kepada masyarakat tentang bagaimana sistem zonasi mempengaruhi pengalaman pendidikan siswa dan interaksi antara siswa, guru, dan staf sekolah. Persepsi masyarakat tentang dampak sistem zonasi dapat tercermin dalam simbol-simbol ini.

Begitupun pada masyarakat kecamatan Tompobulu, terdapat beragam

pemahaman mengenai sistem zonasi. Sebagian besar masyarakat memahami bahwa zonasi adalah metode pembagian wilayah berdasarkan jarak tempat tinggal dengan sekolah sebagai kriteria utama dalam proses penerimaan peserta didik baru. Memberikan pemerataan terhadap seluruh masyarakat dalam mengakses dunia pendidikan yang berkeadilan dengan melihat prinsip-prinsip di dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah yang salah satunya adalah kualitas dan mutu dari sebuah lembaga sekolah (Amirullah, n.d.).

Pemahaman yang tidak sama ini memunculkan berbagai anggapan, sebagian mendukung sepenuhnya kebijakan ini, menganggapnya sebagai pengurangan fenomena "sekolah favorit" yang sering kali memberikan kesempatan lebih baik kepada peserta didik di wilayah tertentu, sementara yang lain harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan pendidikan yang setara.

Sebagian masyarakat juga merasa skeptis terhadap sistem zonasi ini dan mengkritiknya dengan berbagai alasan. Beberapa alasan yang sering disampaikan adalah perbedaan kualitas pendidikan antar wilayah, kekhawatiran terhadap kurangnya kebebasan memilih sekolah, serta kecemasan akan terbatasnya kesempatan untuk masuk ke sekolah yang diinginkan karena batasan jarak

Pemerintah dan lembaga pendidikan dapat melakukan penelitian dan analisis dampak yang komprehensif. Data-data empiris tentang keberhasilan atau tantangan yang dihadapi oleh implementasi sistem zonasi dalam pendidikan dapat membantu meminimalisir spekulasi dan opini yang tidak berdasar. Melibatkan berbagai kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, seperti melalui forum diskusi atau survei, juga dapat membantu

mengumpulkan masukan yang beragam dan mewakili.

Diperlukan dedikasi dari semua pelaku pendidikan, khususnya pemerintah, guru, dan orang tua, untuk meningkatkan standar layanan dan kelancaran jangkauan pendidikan bagi setiap warga negara tanpa membedakan. Diskriminasi dalam konteks pendidikan tak hanya mencakup faktor suku, agama, ras, dan fisik. Isu signifikan dalam ranah pendidikan di Indonesia melibatkan perluasan serta pemerataan akses pendidikan, serta langkah untuk mengatasi kesenjangan fasilitas antar daerah (Nurlaily1 et al., n.d.).

Keseluruhan, perbedaan persepsi masyarakat terhadap kebijakan sistem zonasi dalam pendidikan adalah fenomena yang wajar dalam sebuah masyarakat yang kompleks dan beragam. Upaya untuk mengatasi perbedaan tersebut memerlukan komunikasi yang efektif, penyediaan informasi yang akurat, dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak yang terkait. Dengan demikian, diharapkan kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan lebih lancar dan mendapatkan dukungan lebih luas dari masyarakat.

2. Dampak dan Solusi Dalam Merespon Kebijakan Sistem Zonasi di Kecamatan Tompobulu

Harapan dan solusi dari Masyarakat Kecamatan Tompobulu serta pihak-pihak lainnya memiliki peranan penting dalam menciptakan perbaikan dan pengembangan penerapan sistem zonasi sekolah ke depannya. Sebagai bagian dari masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan ini, partisipasi mereka dalam memberikan masukan dan dukungan sangatlah berarti.

Orang tua di Kecamatan Tompobulu memiliki harapan yang tinggi terhadap sistem zonasi sekolah. Mereka berharap agar sistem ini dapat berjalan

lebih baik dan lebih efisien. Implementasi sistem zonasi juga bertujuan untuk menghilangkan istilah sekolah favorit yang sering menjadi primadona di sekolah negeri di seluruh penjuru Indonesia. Prinsip ini berasal dari pemahaman tentang dualitas dalam sistem pendidikan terkait perbedaan antara sekolah yang paling diunggulkan dan sekolah yang kurang diminati. Di samping itu, penggunaan sistem zonasi dalam Pengalokasian Peserta Didik Baru (PPDB) juga didasarkan pada tekad pemerintah untuk menyediakan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh warga negara (Hukum et al., n.d.). Mereka percaya bahwa dengan sistem ini, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas akan menjadi lebih merata tanpa terkecuali. Hal ini diyakini dapat mengurangi kesenjangan antara sekolah-sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Orang tua juga menyadari betapa pentingnya peran sistem zonasi dalam membantu mereka memantau perkembangan anak-anak mereka di sekolah. Dengan sekolah yang lebih dekat dan terjangkau, mereka dapat lebih mudah terlibat dalam proses pendidikan anak-anak dan memberikan dukungan yang lebih besar dalam belajar dan tumbuh kembang mereka.

Penerapan sistem zonasi tidaklah mudah. Untuk mencapai tujuan-tujuan mulia yang diharapkan, perlu dilakukan upaya terus-menerus dalam mengembangkan dan meningkatkan sistem ini. Salah satu aspek yang dianggap krusial adalah peningkatan kualitas guru. Guru yang berkualitas akan menjadi kunci keberhasilan pendidikan di sekolah-sekolah zonasi. Oleh karena itu, dibutuhkan program pelatihan dan pengembangan profesionalisme bagi para

guru agar mereka dapat memberikan pendidikan terbaik bagi para siswa.

Seorang pendidik diharapkan senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya guna menjaga agar informasi dan kemampuannya tetap relevan dengan perkembangan zaman. Kemampuan yang dimiliki tak hanya terfokus pada hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan profesional, melainkan juga tanggung jawab dalam lingkup sosial dan kemanusiaan (Islam et al., 2012).

Selain guru, perlu juga dilakukan investasi dalam melengkapi sarana dan prasarana sekolah agar tidak kalah dengan sekolah-sekolah di luar zona. Fasilitas yang memadai akan memberikan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa, sehingga mereka akan lebih termotivasi dan bersemangat untuk belajar.

Dalam upaya memperbaiki sistem zonasi sekolah, kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya sangat diperlukan. Melalui dialog dan konsultasi yang intensif, perbaikan dan pengembangan yang dibutuhkan dapat diidentifikasi dan diimplementasikan secara efektif.

Sama seperti teori Fungsional Ogburn menyatakan bahwa perubahan sosial dan teknologi akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam konteks zonasi, perubahan sosial dan teknologi dapat merujuk pada perkembangan dan pertumbuhan, perkembangan infrastruktur, serta perubahan dalam kebutuhan dan tuntutan penduduk. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait sangat penting dalam merencanakan dan mengimplementasikan sistem zonasi yang efektif dan berkelanjutan. Teori Fungsional Ogburn menekankan pentingnya adaptasi masyarakat terhadap perubahan tersebut agar tetap menjaga fungsi sosialnya. Kolaborasi ini

memungkinkan para pemangku kepentingan untuk saling berdialog, memahami kebutuhan dan perspektif masing-masing, serta mencari solusi yang paling sesuai untuk mencapai kesepakatan bersama.

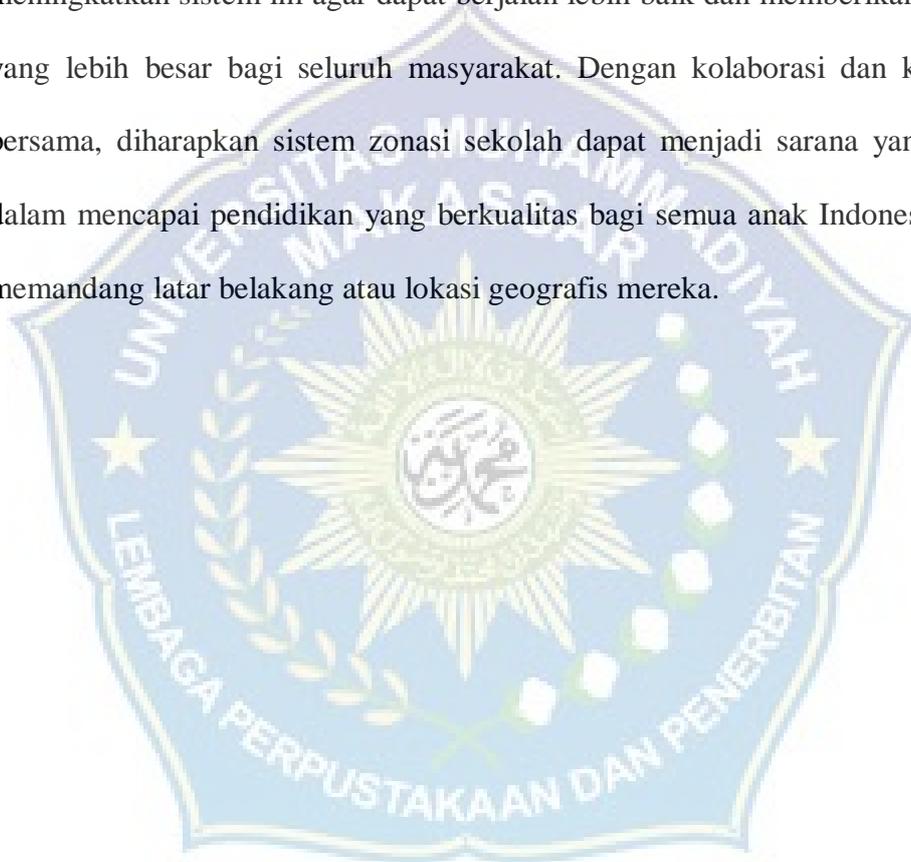
Dalam teori fungsionalisme, perubahan yang terjadi dalam masyarakat umumnya dianggap sebagai upaya untuk mencapai keseimbangan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Dalam hal pendidikan, implementasi sistem zonasi mungkin dipandang sebagai langkah adaptasi yang ditujukan untuk mengatasi ketidakseimbangan dalam distribusi siswa dan menghindari konsentrasi siswa di beberapa sekolah saja. Dengan membagi siswa secara lebih merata, sistem zonasi dapat menciptakan keseimbangan yang lebih baik dalam kualitas pendidikan dan sumber daya yang tersedia di seluruh wilayah.

Namun, teori fungsionalisme juga menekankan bahwa perubahan dan adaptasi harus dijalankan dengan cermat dan seimbang agar tidak mengganggu keseimbangan keseluruhan. Dalam konteks implementasi sistem zonasi, perlu diperhatikan bagaimana perubahan ini dapat memengaruhi sekolah dan masyarakat di wilayah yang terkena dampak khususnya dalam pembahasan ini adalah kecamatan Tompobulu. Langkah-langkah perubahan harus diambil dengan mempertimbangkan efek jangka panjang, sehingga keseimbangan dalam fungsi dan interaksi sosial dapat dipertahankan.

Sistem zonasi dalam pendidikan, yang mengatur distribusi siswa ke sekolah-sekolah berdasarkan wilayah geografis, memiliki potensi untuk memainkan peran dalam menjaga keseimbangan dalam akses pendidikan. Dengan meratakan distribusi siswa di antara sekolah-sekolah di berbagai

wilayah, sistem zonasi dapat membantu mencegah terjadinya disjungsi dalam akses pendidikan yang muncul jika siswa hanya berkumpul di beberapa sekolah populer.

Pemerataan distribusi siswa, sistem zonasi berkontribusi pada perubahan yang lebih seimbang dalam sistem pendidikan, yang pada gilirannya dapat menghindari disjungsi yang muncul akibat kesenjangan akses. Perbaikan dan meningkatkan sistem ini agar dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat. Dengan kolaborasi dan komitmen bersama, diharapkan sistem zonasi sekolah dapat menjadi sarana yang efektif dalam mencapai pendidikan yang berkualitas bagi semua anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang atau lokasi geografis mereka.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang persepsi masyarakat terhadap sistem zonasi di Kecamatan Tompobulu, maka dapat disimpulkan bahwa: Sistem zonasi sekolah adalah kebijakan yang mendapat perhatian serius dari masyarakat karena dampaknya yang luas dan kompleks. Kebijakan ini mencoba menciptakan pemerataan akses pendidikan dengan membagi wilayah ke dalam zona-zona tertentu. Meskipun sistem zonasi memiliki beberapa kelebihan, seperti pemerataan akses pendidikan dan dukungan lebih maksimal dari orang tua, tetapi juga menimbulkan perdebatan dan tantangan yang signifikan.

Para pendukung sistem zonasi meyakini bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk mengurangi kesenjangan antara sekolah-sekolah yang favorit atau unggulan dengan sekolah-sekolah lainnya. Selain itu, sistem zonasi dianggap sebagai upaya untuk memperbaiki mutu pendidikan secara menyeluruh dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

Di sisi lain, para penentang sistem zonasi mengkhawatirkan keterbatasan pilihan sekolah bagi orang tua dan siswa. Mereka berpendapat bahwa orang tua seharusnya memiliki kebebasan untuk memilih sekolah yang dianggap sesuai dengan kebutuhan dan minat anak-anak mereka. Selain itu, sistem zonasi juga dapat menyebabkan ketimpangan fasilitas dan mutu pendidikan di antara sekolah-sekolah dalam satu zona.

Untuk mencapai tujuan penerapan sistem zonasi secara efektif, perlu dilakukan peningkatan kualitas guru dan sarana-prasarana sekolah. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait juga menjadi kunci untuk mengatasi tantangan dan memperbaiki sistem ini.

Secara keseluruhan, implementasi sistem zonasi sekolah memerlukan evaluasi yang cermat dan perbaikan berkelanjutan. Melalui dialog dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan sistem zonasi dapat menjadi alat yang efektif dalam mencapai pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang atau lokasi geografis mereka.

B. Saran Penelitian

1. Saran Bagi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat kecamatan Tompobulu mengetahui mengenai sistem zonasi meskipun memiliki persepsi yang berbeda-beda. Oleh karena itu perlunya partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi kebijakan ini bahkan menyuarakan apapun yang masih perlu diperbaiki.

2. Saran Bagi Pemerintah

Walaupun kebijakan sistem zonasi sudah terlanjur di berlakukan dan masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan antar sekolah, pemerintah agar secepatnya mengurangi atau bahkan menghapusnya dengan cara meningkatkan kualitas semua sekolah seperti sarana dan prasarana dan tenaga pendidik.

3. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang sistem zonasi sekolah, peneliti bisa meninjau secara kritis strategi yang digunakan dalam penerapan sistem zonasi. Apakah ada metode yang lebih efektif untuk memetakan zona, bagaimana strategi tersebut mempertimbangkan

dinamika populasi siswa, perubahan sosial, dan kondisi geografis. Dengan melakukan penelitian yang komprehensif dan mendalam, diharapkan peneliti selanjutnya dapat memberikan kontribusi berharga dalam memahami dan meningkatkan efektivitas sistem zonasi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas.



DAFTAR PUSTAKA

- Anam, S. (2019). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (Smpn) Di Kabupaten Pamekasan. *Reformasi*, 9(2), 112. <https://doi.org/10.33366/Rfr.V9i2.1413>
- Aleng, B., & Sulistyarini, S. (N.D.). *Upaya Orang Tua Mengatasi Keberlanjutan Pendidikan Anak Di Desa Piawas Kecamatan Belimbing Hulu*.
- Amirullah, D. (N.D.). *Sistem Zonasi Sebagai Solusi Bagi Orang Tua Untuk Mendapatkan Pendidikan Anak Yang Bermutu Di Kota Kupang*.
- Dany, I. (N.D.). *Dampak Sistem Zonasi Bagi Sekolah Menengah Pertama*.
- Dauta, R. A. (2020). *Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Keguruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat Disekolah Menengah Pertama Negeri 25 Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru*.
- Faiz, P. M. (2017). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory Of Justice). *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>
- Florida, N., López, C., & Pocomucha, V. (2012). *Pentingnya Pendidikan Bagi Mnesia*. 2(2), 35–43.
- Hartanti, E. (2017). *Pola Asuh Orang Tua Single Parent Dalam Perkembangan Kepribadian Anak Di Desa Jetis Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung*.
- Heryana, A., Unggul, U. E., & Emergency, H. (2018). *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*. December.
- Hukum, F., Majalengka, U., & Yuliani, N. (N.D.). *Presumption Of Law Tinjauan Yuridis Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Sistem Zonasi*.
- Ika, G., & Rukiyati, P.; (2019). Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Perspektif Pendidikan. *Jurnal Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 4. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jmsp/>
- Islam, U., Sunan, N., & Yogyakarta, K. (2012). Pengembangan Kualitas Kepribadian Guru Ahwy Oktradiksa. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2). <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/>

- Juabdin Sada, H., & Islam Negeri Raden Intan Lampung, U. (2017). Peran Masyarakat Dalam Pendidikan Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8.
- Madiana, I., Alqadri, B., Sumardi, L., & Mustari, M. (2022). Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi Serta Dampaknya Terhadap Kesetaraan Hak Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(2c), 735–740. <https://doi.org/10.29303/Jipp.V7i2c.633>
- Maldini, R. (2019). *Analisis Dukungan Orang Tua Dalam Keberlanjutan Pendidikan Anak Di Dukuh Bregan Kabupaten Sukoharjo*.
- Mulyawan, H. (2018). *Iai Bunga Bangsa Cirebon*. 1–81.
- Normina. (N.D.). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*.
- Nugraha, A. (2019). Pentingnya Pendidikan Berkelanjutan Di Era Revolusi Industri 4.0. *Majalah Ilmiah Pelita Ilmu*, 2(1), 26–37. <https://doi.org/10.37849/Mipi.V2i1.118>
- Nurlaily¹, N. Y., Wicaksana², S. U., Irmawanto, R., Holisin, I., Abstrak, I. A., Kunci, K., Pendidikan, A., Manusia, H. A., & Perkotaan, P. (N.D.). Pemenuhan Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Pinggiran Perkotaan: Studi Kasus SD Budi Yakin Surabayaid 4 *Corresponding Author: Satria Unggul Wicaksana. In *Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat* (Vol. 1). Online.
- Nyoman, O. I., & Astawa, T. (N.D.). *Memahami Peran Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Kemajuan Mutu Pendidikan Di Indonesia*. <http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/JPM>
- Sosial, K., Rawls, J., Pada, S., Menengah, S., Di Blitar Raya, A., Memenuhi, U., & Persyaratan, S. (N.D.). *Model Sistem Zonasi Dari Perspektif Teori*.
- Syakarofath, N. A., Sulaiman, A., & Irsyad, M. F. (2020). Kajian Pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(2), 115–130. <https://doi.org/10.24832/Jpnk.V5i2.1736>
- Uyun, A. S. (2019). *“Pengertian Pendidikan.”*
- Yuniar, D. P. (2021). Faktor Penyebab Putus Sekolah Pada Anak Di Wilayah Pedesaan (Studi Kasus Di Desa Sonowangi Kabupaten Malang). *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)*, 6(1), 99–107.

<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/e-plus/article/view/11428>



INSTRUMEN OBSERVASI

Nama Aktivitas	:	Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Zonasi di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng
Hari/Tanggal	:	Kamis 21 Juli 2023
Waktu	:	10.00
Lokasi	:	Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng

Keadaan Aktivitas

Nomor	Tema/Objek	Interpretation
1	Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kebijakan ssstem zonasi di kecamatan Tompobulu kabupaten Bantaeng?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pandangan terhadap kebijakan sistem zonasi di sekolah 2. Penerapan kebijakan sistem zonasi secara efektif dalam mendistribusikan siswa di sekolah
2	Bagaimana solusi dalam merespon kebijakan sistem zonasi di kecamatan Tompobulu kabupaten Bantaeng?	<ol style="list-style-type: none"> 3. Harapan terhadap kebijakan system zonasi di sekolah 4. Mengatasi hambatan kebijakan sistem zonasi 5. Hambatan dalam sosialisasi kebijakan sistem zonasi 6. Publikasi secara terbuka informasi mengenai kebijakan system zonasi 7. Hambatan penerapan kebijakan sistem zonasi

INSTRUMEN WAWANCARA

Nama Aktivitas	:	Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Zonasi kecamatan Tompobulu kabupaten Bantaeng
Hari/Tanggal	:	Kamis 21 Juli 2023
Waktu	:	10:00
Lokasi	:	Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng

Keadaan Aktivitas

Nomor	Tema/Objek	Interpretation
1	Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kebijakan sistem zonasi di kecamatan Tompobulu kabupaten Bantaeng?	1. Umum a. Bagaimana pandangan anda terhadap kebijakan system zonasi di sekolah? b. Apakah penerapan kebijakan system zonasi telah berlaku secara efektif dalam mendistribusikan siswa di sekolah?
2	Bagaimana solusi dalam merespon kebijakan system zonasi di kecamatan Tompobulu kabupaten Bantaeng?	c. Bagaimana harapan anda terhadap kebijakan system zonasi di sekolah? 2. Sekolah/Pemerintah a. Bagaimana Upaya sekolah dalam mengatasi hambatan kebijakan system zonasi? b. Apakah sosialisasi kebijakan system zonasi mengalami hambatan ? jelaskan c. Apakah akses informasi kebijakan system zonasi disekolah telah di publikasikan secara terbuka? d. Apakah penerapan kebijakan system zonasi mengalami hambatan?

L

A

M

P

I

R

A

N



1. Dokumentasi

Wawancara Bersama salah satu guru di MTs. Muhammadiyah Ereng-Ereng



Wawancara Bersama salah satu masyarakat kelurahan Ereng-Ereng



Wawancara Bersama salah satu masyarakat kelurahan Ereng-Ereng



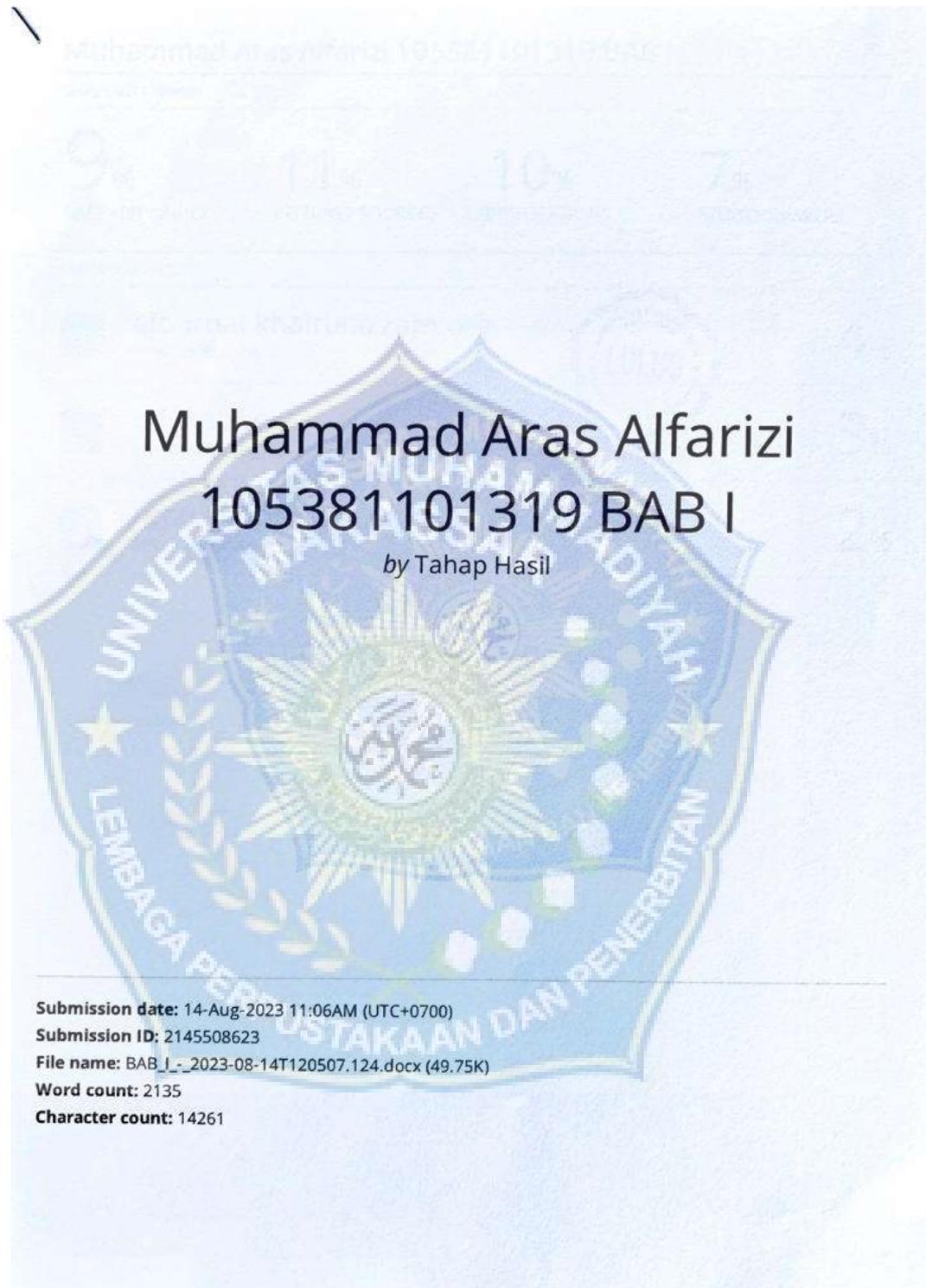
Wawancara Bersama salah satu masyarakat kelurahan Ereng-Ereng



Wawancara Bersama salah satu masyarakat kelurahan Ereng-Ereng



2. Lampiran Plagiasi



Muhammad Aras Alfarizi 105381101319 BAB I

by Tahap Hasil

Submission date: 14-Aug-2023 11:06AM (UTC+0700)
Submission ID: 2145508623
File name: BAB_I_-_2023-08-14T120507.124.docx (49.75K)
Word count: 2135
Character count: 14261

Muhammad Aras Alfarizi 105381101319 BAB I

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ejournal.khairulazzam.org

Internet Source

4%

2

edukatif.org

Internet Source

3%

3

repo.stiapembangunanjember.ac.id

Internet Source

2%



Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



Muhammad Aras Alfarizi
105381101319 BAB II
by Tahap Tutup

Submission date: 14-Aug-2023 11:08AM (UTC+0700)
Submission ID: 2145509368
File name: BAB_II_-_2023-08-14T120557.403.docx (70.46K)
Word count: 4665
Character count: 32162

Muhammad Aras Alfarizi 105381101319 BAB II

ORIGINALITY REPORT

23%
SIMILARITY INDEX

22%
INTERNET SOURCES

7%
PUBLICATIONS

8%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	archive.org Internet Source	4%
2	eprints.umm.ac.id Internet Source	4%
3	yuimyblog.blogspot.com Internet Source	1%
4	www.researchgate.net Internet Source	1%
5	digilib.uns.ac.id Internet Source	1%
6	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	1%
7	jurnal.fkip.uns.ac.id Internet Source	1%
8	e proceedings.umpwr.ac.id Internet Source	1%
9	jurnal.unublitar.ac.id Internet Source	1%



Muhammad Aras Alfarizi
105381101319 BAB III
by Tahap Tutup

Submission date: 14-Aug-2023 11:11AM (UTC+0700)

Submission ID: 2145511239

File name: BAB_III_-_2023-08-14T120835.814.docx (44.5K)

Word count: 1968

Character count: 13314

Muhammad Aras Alfarizi 105381101319 BAB III

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

idb4.wikispaces.com

Internet Source



4%

2

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

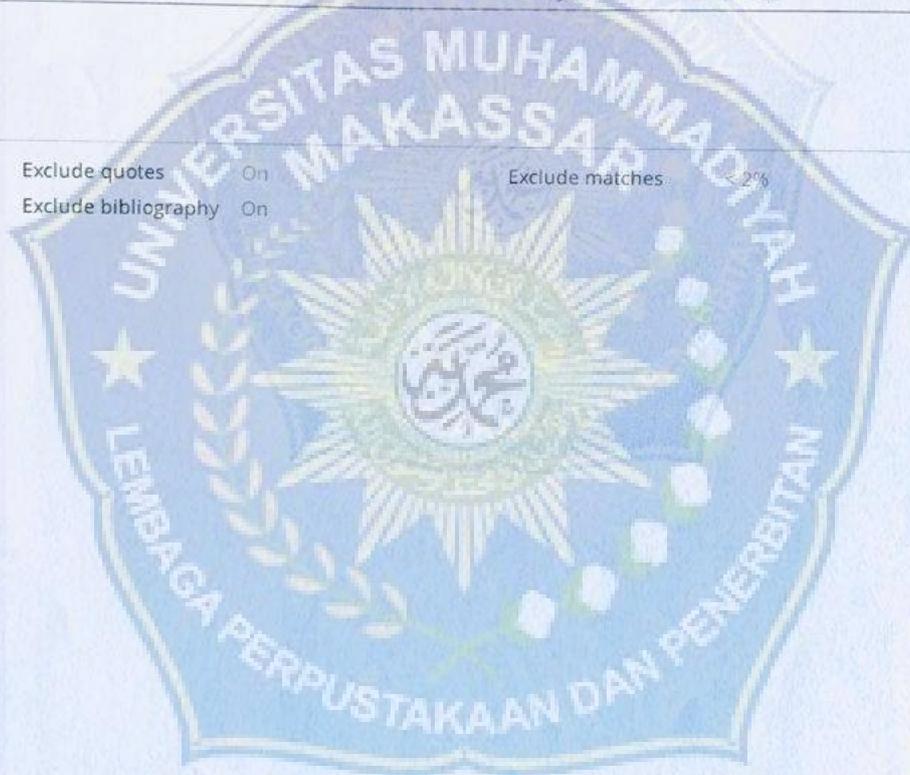


4%

Exclude quotes On

Exclude matches On 2%

Exclude bibliography On



Muhammad Aras Alfarizi

105381101319 BAB IV

by Tahap Tutup

Submission date: 14-Aug-2023 11:12AM (UTC+0700)
Submission ID: 2145512100
File name: BAB_IV_-_2023-08-14T120845.857.docx (33.67K)
Word count: 1196
Character count: 6632

Muhammad Aras Alfarizi 105381101319 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.unhas.ac.id

Internet Source

4%

2

docobook.com

Internet Source

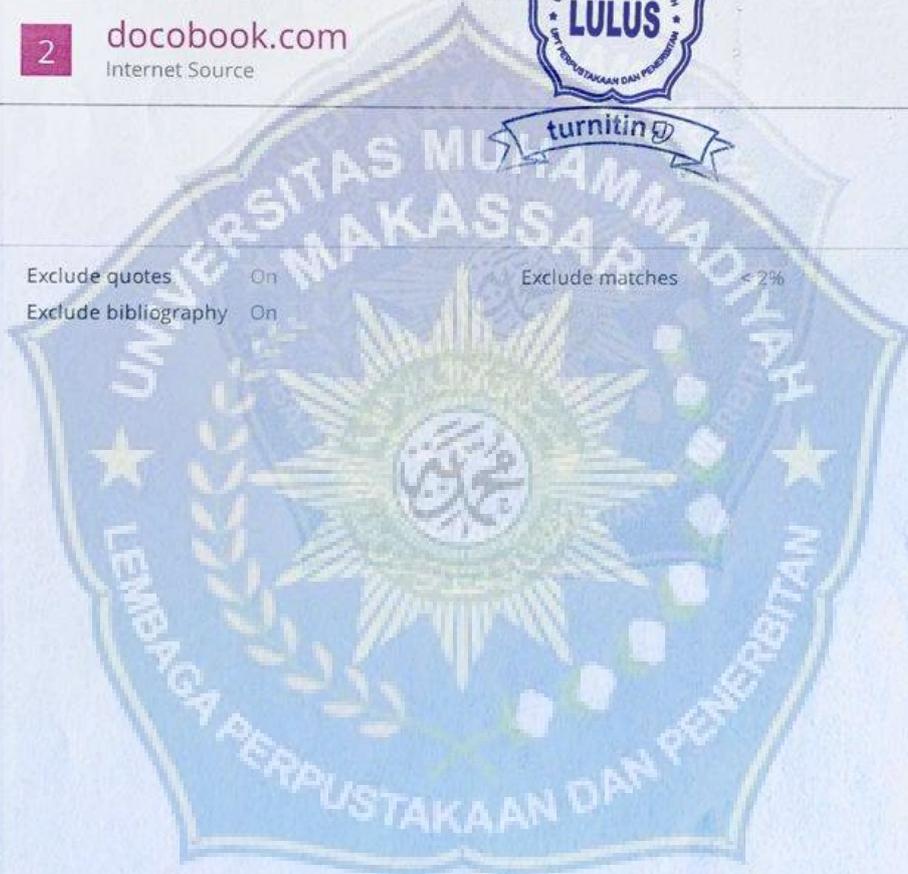
4%



Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



Muhammad Aras Alfarizi

105381101319 BAB V

by Tahap Tutup

Submission date: 14-Aug-2023 11:13AM (UTC+0700)

Submission ID: 2145512508

File name: BAB_V_-_2023-08-14T121236.669.docx (57.06K)

Word count: 3674

Character count: 24178

Muhammad Aras Alfarizi 105381101319 BAB V

ORIGINALITY REPORT

2%	2%	0%	1%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
2	www.attractivejournal.com Internet Source	1%



Exclude quotes On Exclude matches < 1%
Exclude bibliography On



Muhammad Aras Alfarizi

105381101319 BAB VI

by Tahap Tutup

Submission date: 14-Aug-2023 11:14AM (UTC+0700)

Submission ID: 2145512879

File name: BAB_VI_70.docx (21.13K)

Word count: 424

Character count: 2939

Muhammad Aras Alfarizi 105381101319 BAB VI

ORIGINALITY REPORT

5% SIMILARITY INDEX 5% INTERNET SOURCES 2% PUBLICATIONS 0% STUDENT PAPERS

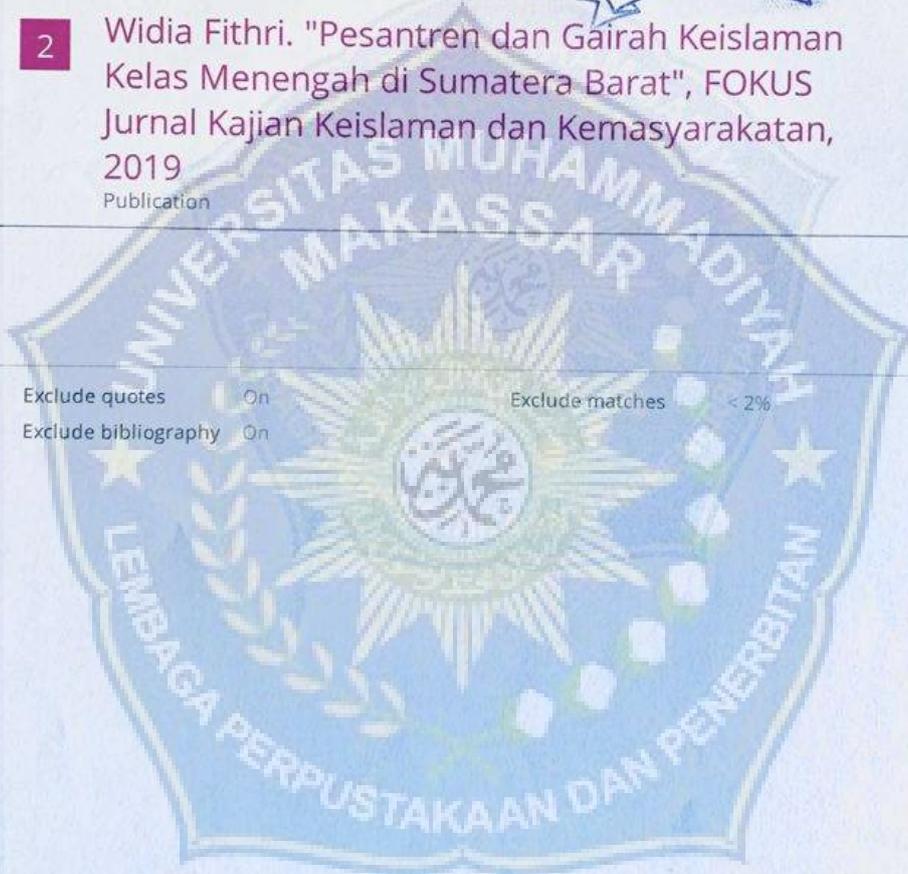
PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|--|----|
| 1 | 123dok.com
Internet Source | 3% |
| 2 | Widia Fithri. "Pesantren dan Gairah Keislaman Kelas Menengah di Sumatera Barat", FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, 2019
Publication | 2% |

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Muhammad Aras Alfari

Nim : 105381101319

Program Studi : Pendidikan Sosiologi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	23 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	2 %	10 %
6	Bab 6	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Agustus 2023
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


M. Hum. M.L.P.
NBM. 964 591

3. Lampiran Persuratan



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI

Jalan Sultan Alaaddin No. 259 Makassar
Telp : 0411-860837/860132 (Fax)
Email : Bkip@unismuh.ac.id
Web : www.fkip.unismuh.ac.id

LEMBAR PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL

Nama : Muhammad Aras Alfariq
NIM : 105381101319
Prodi : Pendidikan Sosiologi
Judul : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP SISTEM ZONASI DI
Mts. MUHAMMADIYAH ERENG-ERENG KABUPATEN GANTENG

No.	Dosen Penguji	Materi Perbaikan	Paraf
1	Dr. Jamaluddin Arifin S.Pd., M.Ed		
2	Nur Rstwandu Marsuta S.Sos.Ms		
3	Risfaisal., S.Pd., M.Ed		
4	Dr. St. Asraeni Am, S.Sos., M.Pd		

Makassar, Juni 2023

Mengetahui,
Ketua prodi
Pendidikan sosiologi

Dr. Jamaluddin Arifin, M.Pd
NBM. 117 4893



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

BERITA ACARA

Pada hari ini Jumat..... Tanggal 09 Juni.....14.....H bertepatan
 tanggal 09 / 1 Juni.....2023..M bertempat di ruang PPG 4.....
 kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, telah dilaksanakan seminar
 Proposal Skripsi yang berjudul :

PERSEPSI ORANG TUA TENTANG SISTEM ZONASI
DI SEKOLAH MIS. MUHAMMADIYAH ERENG-ERENG
KABUPATEN BANTAENG

Dari Mahasiswa :

Nama : Muhammad Aras Alfarizi
 Stambuk/NIM : 10530101319
 Jurusan : Pendidikan Sosiologi
 Moderator : Dr. Jamaluddin Arifin, M.Pd
 Hasil Seminar :
 Alamat/Telp : Pg. Tata 1

Dengan penjelasan sebagai berikut :

Disetujui

Penanggung I : Dr. Jamaluddin Arifin S.Pd^{pd}
 Penanggung II : Nur Riswandy Marsuki S.Sos. MPA
 Penanggung III : Dr. St. Asnaeni AM S.Sos. M.Pd
 Penanggung IV : Risfaisal, S.Pd. M.Pd.

Makassar, 09 Juni 2023

Ketua Jurusan

(Dr. Jamaluddin Arifin, M.Pd)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI

Jalan Sultan Alauddin No. 250 Makassar
 Telp. : 0411-860837, 860132 (Fax)
 Email : bkp@unismuh.ac.id
 Web : www.bkp.unismuh.ac.id

KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Aras Alfarizi
 Stambuk : 105381101319
 Jurusan : Pendidikan Sosiologi
 Pembimbing I : Kaharuddin, S.Pd., M.Pd. Ph.D
 Dengan Judul : Persepsi Orang Tua Terhadap Sistem Zonasi di Sekolah MTS Muhammadiyah Ereng-Ereng

Konsultasi Pembimbing I

No	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
1	19/7/23	- Pambahasan Hubungan hasil penelitian dgn Teori	
2	5/8/23	- kesipulan sesuatu dgn rumus masalah	
3	8/8/23	- Abstrak dan daftar pustaka sesuaikan buku panduan	
4	11/8/23	Ku	

Catatan :

Mahasiswa hanya dapat mengikuti ujian Skripsi jika sudah konsultasi ke Dosen Pembimbing minimal 3 kali

Mengetahui,
 Ketua Jurusan
 Pendidikan Sosiologi



Kaharuddin Arifin, M.Pd
 NBM. 117 4893



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI

Jalan Sultan Alauddin No. 559 Makassar
Telp : 0411-820837860132 (Fax)
Email : ikip@umsuh.ac.id
Web : www.ikip.umsuh.ac.id

KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Aras Alfarizi
Stambuk : 105381101319
Jurusan : Pendidikan Sosiologi
Pembimbing II : Nur Riswandy Marsuki, S.Sos., M.Si
Dengan Judul : Persepsi Orang Tua Terhadap Sistem Zonasi di Sekolah MTS Muhammadiyah Ereng-Ereng

Konsultasi Pembimbing II

No	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
1.	Selasa 25/7 2023	lengkap BAB 1 kondisi pendidikan di kastany & MTS Muhammadiyah Ereng- - Data Informan	
2.	Senin 31/8 2023	- Kerangka pikir dikembangkan harus ada aliran melah dari Bab ke bab.	
3.	Selasa 9/8 2023	Kembangkan hasil dan pembahasan - Analisis teori社会学. di masukkan ke dua pembahasan.	

Catatan :

Mahasiswa hanya dapat mengikuti ujian Skripsi jika sudah konsultasi ke Dosen Pembimbing minimal 3 kali

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Pendidikan Sosiologi

Dr. Jamaluddin Arifin, M.Pd
NPM. 117 4893



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1842/05/C.4-VIII/VII/1444/2023

15 Dzulhijjah 1444 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

03 July 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 13888/FKIP/A.4-II/VI/1444/2023 tanggal 24 Juni 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD ARAS ALFARIZI**

No. Stambuk : **10538 1101319**

Fakultas : **Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

Jurusan : **Pendidikan Sosiologi**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Persepsi Masyarakat terhadap Sistem Zonasi di MTs. Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 5 Juli 2023 s/d 5 September 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Alamat : Jl. Kartini No. 2, Kab. Bantaeng, email : dpmptsp.bantaengkab@gmail.com, website : dpmptsp.bantaengkab.go.id

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7/184/IPL/DPM-PTSP/VII/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
3. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : MUHAMMAD ARAS ALFARIZI
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 N I M : 105381101319
 No. KTP : 7303040807000001
 Program Studi : Pendidikan Sosiologi
 Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar
 Alamat : Desa Labbo Kec. Tompobulu Kabupaten Bantaeng

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :
" Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Zonasi di MTs. Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng "

Lokasi Penelitian : MTs. Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng
 Lama Penelitian : 04 Juli 2023 s.d. 04 Agustus 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudahnya melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan harus melapor kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat- istiadat Daerah setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil Penelitian kepada Bupati Bantaeng Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bantaeng;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng
 Pada tanggal : 10 Juli 2023
a.n. BUPATI BANTAENG

Dinas Penanaman Modal dan PTSP



YOHANIS PHR ROMUTI, S.IP
 Pangkat : Pembina TK.I, IV/b



1202319009000197





Muhammad Aras Alfarizi, lahir di Makassar 08 Juli 2000, merupakan anak pertama dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Ayahanda Anwar dan Ibunda Nadira. Penulis pertama kali menempuh pendidikan Formal pada tahun 2006 di SD Negeri 59 Labbo, lulus pada tahun 2012, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTS Muhammadiyah Ereng-Ereng, lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan sekolah menengah atas (SMA) di SMA Negeri 4 Bantaeng dan lulus pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 penulis terdaftar diperguruan tinggi swasta Universitas Muhammadiyah Makassar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan mengambil jurusan Pendidikan Sosiologi, program studi strata 1 (S1) dengan nomor induk mahasiswa (NIM) 105381101319.

